

**LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
(LKPP)**

Nota Dinas

Nomor : 6222/Ses.1/03/2025

Yth. : Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama
Dari : Plt. Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan
Hal : Penyampaian Laporan Monitoring dan Evaluasi Kinerja Periode Februari Tahun 2025
Tanggal : 18 Maret 2025

Sehubungan dengan telah berakhirnya periode bulan Februari Tahun 2025, dengan ini kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Seiring dengan terbitnya Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang RPJMN 2025-2029 dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Anggaran, saat ini Rancangan Renstra LKPP Tahun 2025-2029 dan Rancangan Renja LKPP Tahun 2025 sedang dalam tahap penyesuaian sehingga pelaporan kinerja LKPP sampai dengan Februari 2025 pada level Sasaran Strategis, Sasaran Program, Sasaran Kegiatan, dan Rincian Output berpedoman pada Keputusan Kepala LKPP Nomor 23 Tahun 2025 tentang Rancangan Rencana Kerja LKPP Tahun 2025.
2. Pada tahun 2025, LKPP mendapatkan pagu anggaran sebesar Rp166.711.994.000 dan sampai dengan bulan Februari 2025 penyerapan LKPP berdasarkan aplikasi MonSAKTI adalah sebesar Rp12.239.412.238 (7,34%).
3. Sesuai dengan amanat Inpres Nomor 1 Tahun 2025 Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 beserta rincian nilai efisiensi anggaran yang disampaikan oleh Kementerian Keuangan, nilai efisiensi anggaran LKPP adalah Rp49.578.044.000 atau 29,75% dari pagu awal LKPP pada tahun 2025.
4. Mengingat sampai dengan saat ini masih belum adanya kebijakan terkait dengan pengembalian atas pagu anggaran yang diefisiensi, maka penyampaian pelaporan kinerja dan anggaran pada bulan Februari 2025 masih menggunakan pagu awal sebesar Rp166.711.944.000 dan belum dapat menyajikan realisasi anggaran pada level unit organisasi.
5. Nilai IKPA LKPP bulan Februari 2024 berdasarkan Aplikasi OMSPAN (spanint.kemenkeu.go.id) adalah sebesar 64,43.
6. Nilai Kinerja Anggaran (NKA) LKPP pada aplikasi SMART Kementerian Keuangan sampai dengan saat ini belum dapat diinformasikan, dikarenakan aplikasi SMART DJA Kementerian Keuangan masih dalam proses penyesuaian informasi kinerja tahun 2024.
7. Sampai dengan Februari 2025, LKPP belum dapat melaporkan capaian kinerja pada aplikasi E-Monev Bappenas dan SMART Kemenkeu karena aplikasi tersebut masih dalam proses penyesuaian informasi kinerja tahun 2025.
8. Berkaitan dengan hal-hal di atas, untuk meningkatkan kinerja dan anggaran LKPP diharapkan setiap Unit Organisasi agar:
 - a. Melakukan penyesuaian pelaksanaan aktivitas/kegiatan yang mendukung ketercapaian target kinerja dengan memperhatikan efisiensi anggaran belanja pada setiap Unit Organisasi;
 - b. Menyampaikan usulan penyesuaian informasi kinerja tahun 2025 pasca efisiensi anggaran pada level Indikator Sasaran Kegiatan (IKSK), Rincian Output (RO) maupun RO Prioritas Nasional kepada Biro Perencanaan dan Keuangan;
 - c. Menyusun Rencana Penarikan Dana (RPD) untuk Triwulan II s.d Triwulan IV dengan menyesuaikan rencana kegiatan dan kemampuan dalam penyerapan anggaran agar deviasi antara RPD dengan realisasi anggaran masih dalam batas toleransi sebesar ($\pm 5\%$);



Dokumen ini adalah dokumen yang sah dan telah ditandatangani secara elektronik melalui e-Office LKPP. Untuk memastikan keasliannya, silakan scan QRCode dalam dokumen ini dan pastikan anda diarahkan ke alamat <https://eoffice.lkpp.go.id>

- d. PIC Pelaporan setiap unit organisasi agar melaporkan capaian kinerja dan anggaran serta bukti dukung pada aplikasi SiREMON secara berkala;
- e. Melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan serta anggaran secara berkala di unit organisasi masing-masing.

Dalam hal membutuhkan penjelasan dan koordinasi lebih lanjut dapat menghubungi kami melalui Sdri. Resa Anggriani (0819-3209-6526). Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik
Edi Kristiyanto

Tembusan :

1. Sekretaris Utama
2. Deputi Bidang Pengembangan Strategi dan Kebijakan
3. Deputi Bidang Transformasi Pengadaan Digital
4. Deputi Bidang Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia
5. Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sengkah



LAPORAN

MONITORING & EVALUASI KINERJA UNIT ORGANISASI



Periode Bulan Februari

**TAHUN
2025**

BIRO PERENCANAAN DAN KEUANGAN

Gedung LKPP Lt 9
Kompleks Rasuna Epicentrum
Jalan Epicentrum Tengah Lot 11 B,
RT.2/RW.5, Karet Kuningan, Kecamatan
Setiabudi, Kota Jakarta Selatan, Daerah
Khusus Ibukota Jakarta



021-29935577
www.lkpp.go.id



SUMMARY

CAPAIAN FISIK LEMBAGA



Sasaran Kegiatan

25 | 87

Sasaran Kegiatan

Indikator



Rincian Output

64

Rincian Output

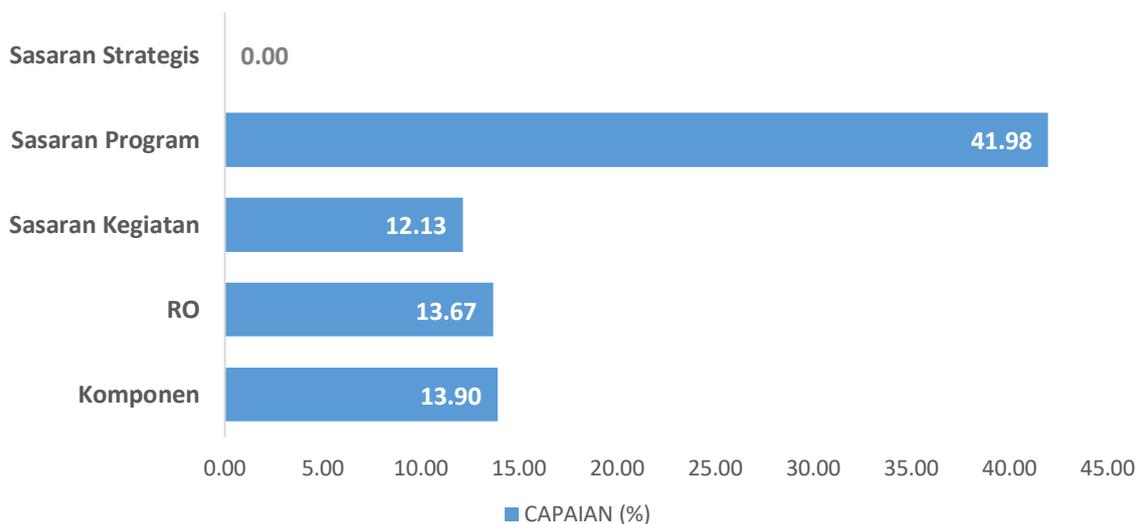
Komponen

171

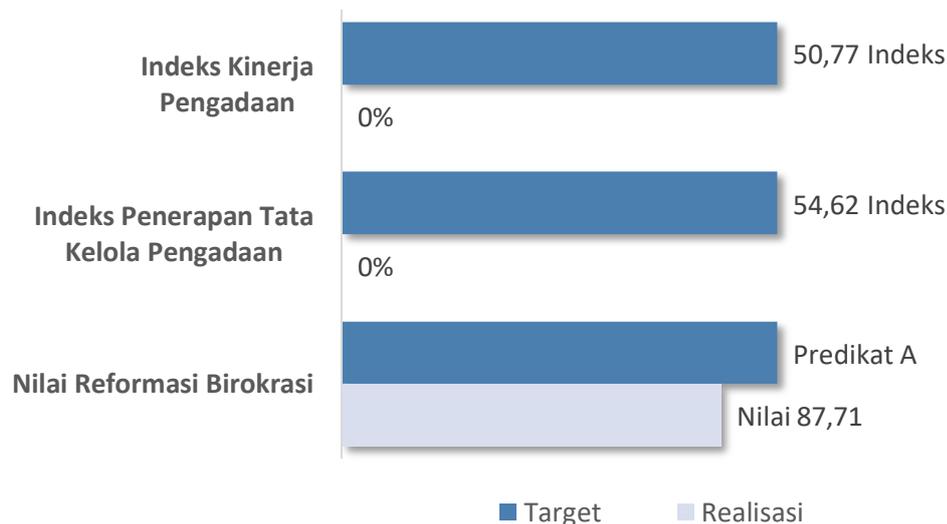
Komponen



Capaian Fisik



Sasaran Strategis



Catatan

“

Seiring dengan terbitnya Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang RPJMN 2025-2029 dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Anggaran, saat ini Rancangan Renstra LKPP Tahun 2025-2029 dan Rancangan Renja LKPP Tahun 2025 sedang dalam tahap penyesuaian sehingga pelaporan kinerja LKPP sampai dengan Februari 2025 pada level Sasaran Strategis, Sasaran Program, Sasaran Kegiatan, dan Rincian Output berpedoman pada Keputusan Kepala LKPP Nomor 23 Tahun 2025 tentang Rancangan Rencana Kerja LKPP Tahun 2025.

”

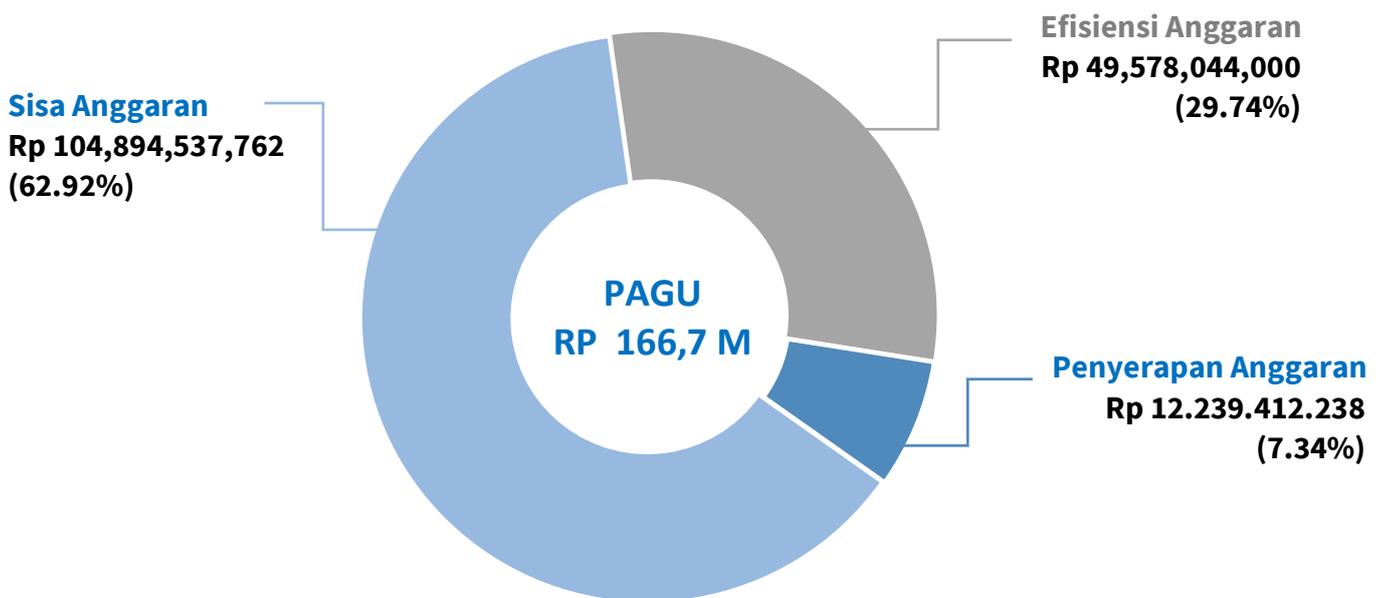
SUMMARY

Penyerapan Anggaran



Realisasi Penyerapan Anggaran LKPP TA 2025 berdasarkan aplikasi MonSAKTI

Per tanggal 28 Februari 2025



*Sumber: Aplikasi MonSAKTI Kementerian Keuangan RI tanggal 28 Februari 2025

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	5
BAB I	8
MONITORING DAN EVALUASI LEMBAGA	8
1.1 ANGGARAN	8
1.1.1 Pagu Anggaran	8
1.1.2 Penyerapan Anggaran	9
1.2 PELAPORAN EKSTERNAL	11
1.2.1. Pelaporan Kinerja pada E-Monev BAPPENAS	11
BAB II	12
MONITORING DAN EVALUASI UNIT ORGANISASI	12
2.1 BIRO PERENCANAAN DAN KEUANGAN (BPKEU)	12
A. Capaian Kinerja Fisik	12
B. Capaian Kinerja Anggaran.....	13
C. Catatan Monitoring dan Evaluasi	13
D. Rekomendasi	13
2.2 BIRO HUKUM, ORGANISASI DAN SUMBER DAYA MANUSIA (BHOSDM)	15
A. Capaian Kinerja Fisik	15
B. Capaian Kinerja Anggaran.....	15
C. Catatan Monitoring dan Evaluasi	16
D. Rekomendasi	16
2.3 BIRO HUBUNGAN MASYARAKAT DAN UMUM (BHU)	17
A. Capaian Kinerja Fisik	17
B. Capaian Kinerja Anggaran.....	18
C. Catatan Monitoring dan Evaluasi	18
D. Rekomendasi	18
2.4 DIREKTORAT PENGEMBANGAN STRATEGI DAN KEBIJAKAN PENGADAAN UMUM (D1.1)	20
A. Capaian Kinerja Fisik	20
B. Capaian Kinerja Anggaran.....	20
C. Catatan Monitoring dan Evaluasi	21
D. Rekomendasi	21
2.5 DIREKTORAT PENGEMBANGAN STRATEGI DAN KEBIJAKAN PENGADAAN KHUSUS (D1.2)	23
A. Capaian Kinerja Fisik	23
B. Capaian Kinerja Anggaran.....	23

C.	Catatan Monitoring dan Evaluasi	24
D.	Rekomendasi	24
2.6	DIREKTORAT PENGEMBANGAN IKLIM USAHA DAN KERJASAMA INTERNASIONAL (D1.3)	25
A.	Capaian Kinerja Fisik	25
B.	Capaian Kinerja Anggaran.....	26
C.	Catatan Monitoring dan Evaluasi	26
D.	Rekomendasi	26
2.7	DIREKTORAT PERENCANAAN TRANSFORMASI, PEMANTAUAN, DAN EVALUASI PENGADAAN (D2.1)	28
A.	Capaian Kinerja Fisik	28
B.	Capaian Kinerja Anggaran.....	29
C.	Catatan Monitoring dan Evaluasi	29
D.	Rekomendasi	29
2.8	DIREKTORAT SISTEM PENGADAAN DIGITAL (D2.2).....	31
A.	Capaian Kinerja Fisik	31
B.	Capaian Kinerja Anggaran.....	31
C.	Catatan Monitoring dan Evaluasi	32
D.	Rekomendasi	32
2.9	DIREKTORAT PASAR DIGITAL PENGADAAN (D2.3).....	33
A.	Capaian Kinerja Fisik	33
B.	Capaian Kinerja Anggaran.....	33
C.	Catatan Monitoring dan Evaluasi	34
D.	Rekomendasi	34
2.10	DIREKTORAT PENGEMBANGAN PROFESI DAN KELEMBAGAAN (D3.1)	35
A.	Capaian Kinerja Fisik	35
B.	Capaian Kinerja Anggaran.....	35
C.	Catatan Monitoring dan Evaluasi	36
D.	Rekomendasi	36
2.11	DIREKTORAT SERTIFIKASI PROFESI (D3.3).....	37
A.	Capaian Kinerja Fisik	37
B.	Capaian Kinerja Anggaran.....	37
C.	Catatan Monitoring dan Evaluasi	38
D.	Rekomendasi	38
2.12	DIREKTORAT ADVOKASI PEMERINTAH PUSAT (D4.1)	40
A.	Capaian Kinerja Fisik	40
B.	Capaian Kinerja Anggaran.....	41

C.	Catatan Monitoring dan Evaluasi	41
D.	Rekomendasi	42
2.13	DIREKTORAT ADVOKASI PEMERINTAH DAERAH (D4.2)	43
A.	Capaian Kinerja Fisik	43
B.	Capaian Kinerja Anggaran.....	44
C.	Catatan Monitoring dan Evaluasi	44
D.	Rekomendasi	45
2.14	DIREKTORAT PENANGANAN PERMASALAHAN HUKUM (D4.3)	46
A.	Capaian Kinerja Fisik	46
B.	Capaian Kinerja Anggaran.....	47
C.	Catatan Monitoring dan Evaluasi	47
D.	Rekomendasi	48
2.15	INSPEKTORAT	49
A.	Capaian Kinerja Fisik	49
B.	Capaian Kinerja Anggaran.....	49
C.	Catatan Monitoring dan Evaluasi	49
D.	Rekomendasi	50
2.16	PUSAT PELATIHAN SDM PENGADAAN BARANG/JASA.....	51
A.	Capaian Kinerja Fisik	51
B.	Capaian Kinerja Anggaran.....	52
C.	Catatan Monitoring dan Evaluasi	52
D.	Rekomendasi	52
2.17	PUSAT DATA DAN INFORMASI (PUSDATIN).....	54
A.	Capaian Kinerja Fisik	54
B.	Capaian Kinerja Anggaran.....	55
C.	Catatan Monitoring dan Evaluasi	55
D.	Rekomendasi	56
BAB III	57
KESIMPULAN	57
A.	Kesimpulan	57
B.	Rekomendasi	58

BAB I MONITORING DAN EVALUASI LEMBAGA

1.1 ANGGARAN

1.1.1 Pagu Anggaran

Berdasarkan dokumen Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Induk LKPP TA 2025 dengan Nomor: SP DIPA-106.01-0/2025 tanggal 02 Desember 2024, pagu anggaran LKPP tahun 2025 sebesar Rp166.711.994.000. Adapun komposisi anggaran LKPP per jenis belanja adalah sebagai berikut:

Jenis Belanja	Pagu (Rp)	%
51 Belanja Pegawai	65.901.318.000	39,53%
52 Belanja Barang	98.714.391.000	59,21%
53 Belanja Modal	2.096.285.000	1,26%
TOTAL	166.711.994.000	100%

Adapun pembagian pagu anggaran tersebut ke Unit Organisasi adalah sebagai berikut:

Unit Organisasi	51 Belanja Pegawai (Rp)	52 Belanja Barang (Rp)	53 Belanja Modal (Rp)	TOTAL PAGU (Rp)
SETTAMA	65.901.318.000	53.319.777.000	175.000.000	119.396.095.000
BHOSDM	-	5.682.195.000	60.000.000	5.742.195.000
BPKeu	-	2.814.109.000	-	68.715.427.000
BHU	-	44.823.473.000	115.000.000	44.938.473.000
BPKeu (Belanja Pegawai)	65.901.318.000	-	-	65.901.318.000
Kedepatian 1 (D1)	-	7.869.092.000	-	7.869.092.000
D1.1	-	3.170.255.000	-	3.170.255.000
D1.2	-	2.100.812.000	-	2.100.812.000
D1.3	-	2.598.025.000	-	2.598.025.000
Kedepatian 2 (D2)	-	11.394.378.000	-	11.394.378.000
D2.1	-	1.963.356.000	-	1.963.356.000
D2.2	-	7.521.299.000	-	7.521.299.000
D2.3	-	1.909.723.000	-	1.909.723.000
Kedepatian 3 (D3)	-	7.247.289.000	-	7.247.289.000
D3.1	-	3.539.260.000	-	3.539.260.000
D3.3	-	3.708.029.000	-	3.708.029.000
Kedepatian 4 (D4)	-	6.918.050.000	71.500.000	6.989.550.000
D4.1	-	1.944.566.000	-	1.944.566.000
D4.2	-	2.989.263.000	71.500.000	3.060.763.000
D4.3	-	1.984.221.000	-	1.984.221.000
INSPEKTORAT	-	927.860.000	-	927.860.000
PUSLAT	-	3.295.782.000	473.000.000	3.768.782.000
PUSDATIN	-	7.742.163.000	1.376.785.000	9.118.948.000
TOTAL	65.901.318.000	98.714.391.000	2.096.285.000	166.711.994.000

Pada Tahun 2025, terdapat kebijakan nasional yang tertuang pada Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Inpres Nomor 1 Tahun 2025) yang mengamanatkan kepada Kementerian/Lembaga untuk melakukan Identifikasi Rencana Efisiensi Belanja Sesuai Besaran yang ditetapkan Menteri Keuangan. Lebih lanjut, efisiensi anggaran LKPP didasarkan pada:

- 1) Surat Menteri Keuangan Nomor Nomor S-37/MK.02/2025 tanggal 24 Januari 2025 Perihal Efisiensi Belanja Kementerian/ Lembaga dalam Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025.
- 2) Surat Menteri Keuangan Nomor S-75/MK.02/2025 tanggal 13 Februari 2025 Perihal Tindak Lanjut Efisiensi Belanja Kementerian/Lembaga dalam Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025.
- 3) Penyampaian Rincian Nilai Efisiensi Anggaran Melalui *One on One Meeting* bersama DJA dan DJPB.

Berdasarkan dinamika tersebut, postur anggaran LKPP setelah efisiensi adalah sebesar Rp 49,578 M atau 29,75% dari pagu awal LKPP sebesar Rp 166,71 M dengan rincian sebagai berikut:

Program		Pagu Awal (Rp)	Efisiensi (Rp)	Pagu Tersedia (Rp)
106.01.CJ	Program Pengadaan Barang/Jasa Nasional	37.269.091.000	28.413.051.000	8.856.040.000
106.01.WA	Program Dukungan Manajemen	129.442.903.000	21.164.983.000	108.277.920.000
TOTAL		166.711.944.000	49.578.044.000 (29,75%)	117.133.960.000 (70,25%)

Namun demikian mengingat sampai dengan saat ini masih belum adanya kebijakan terkait dengan pengembalian atas pagu anggaran yang diefisiensi, maka penyampaian pelaporan kinerja dan anggaran pada bulan Februari 2025 masih menggunakan pagu awal sebesar Rp166.711.944.000 dan belum dapat menyajikan realisasi anggaran pada level unit organisasi.

1.1.2 Penyerapan Anggaran

Berdasarkan aplikasi MonSAKTI Kementerian Keuangan sampai dengan 28 Februari 2025 penyerapan anggaran LKPP adalah sebesar RP12.239.412.238 atau sebesar 7.34%. Adapun rincian penyerapan anggaran LKPP per jenis belanja adalah sebagai berikut:

- Penyerapan per Jenis Belanja

Jenis Belanja	Pagu (Rp)	Realisasi		Sisa Anggaran (Rp)
		Nominal (Rp)	%	
51 Belanja Pegawai	65.901.318.000	6.872.459.679	10,43%	59.028.858.321
52 Belanja Barang	98.714.391.000	5.366.952.559	5,44%	93.347.438.441
53 Belanja Modal	2.096.285.000	-	0%	2.096.285.000
Total	166.711.994.000	12.239.412.238	7,34%	154.472.581.762

- Penyerapan per Unit Organisasi Eselon I dan Eselon II Mandiri

Unit Organisasi	Pagu (Rp)	Realisasi		Sisa Anggaran (Rp)
		Nominal (Rp)	%	
PUSDATIN	Rp9.118.948.000	Rp1.152.661.937	12,64%	Rp7.966.286.063
SES (Gaji)	Rp65.901.318.000	Rp6.872.459.679	10,43%	Rp59.028.858.321
D2	Rp11.394.378.000	Rp892.234.226	7,83%	Rp10.502.143.774
D3	Rp7.247.289.000	Rp373.107.035	5,15%	Rp6.874.181.965
PUSLAT	Rp3.768.782.000	Rp166.743.314	4,42%	Rp3.602.038.686
SES	Rp53.494.777.000	Rp2.268.240.516	4,24%	Rp51.226.536.484
D1	Rp7.869.092.000	Rp301.914.709	3,84%	Rp7.567.177.291
INSPEKTORAT	Rp927.860.000	Rp30.591.399	3,30%	Rp897.268.601
D4	Rp6.989.550.000	Rp181.459.423	2,60%	Rp6.808.090.577
TOTAL	Rp166.711.994.000	Rp12.239.412.238	7,34%	Rp154.472.581.762

- Penyerapan per Unit Organisasi Eselon II

Unit Organisasi	Pagu (Rp)	Realisasi		Sisa Anggaran (Rp)
		Nominal (Rp)	%	
BHOSDM	Rp5.742.195.000	Rp198.274.726	3,45%	Rp5.543.920.274
BHU	Rp44.938.473.000	Rp1.975.707.574	4,40%	Rp42.962.765.426
BPKeu	Rp2.814.109.000	Rp94.258.216	3,35%	Rp2.719.850.784
BPKeu (Gaji)	Rp65.901.318.000	Rp6.872.459.679	10,43%	Rp59.028.858.321
D1.1	Rp3.170.255.000	Rp148.318.633	4,68%	Rp3.021.936.367
D1.2	Rp2.100.812.000	Rp63.251.923	3,01%	Rp2.037.560.077
D1.3	Rp2.598.025.000	Rp90.344.153	3,48%	Rp2.507.680.847
D2.1	Rp1.963.356.000	Rp210.573.000	10,73%	Rp1.752.783.000
D2.2	Rp7.521.299.000	Rp498.879.996	6,63%	Rp7.022.419.004
D2.3	Rp1.909.723.000	Rp182.781.230	9,57%	Rp1.726.941.770
D3.1	Rp3.539.260.000	Rp81.986.060	2,32%	Rp3.457.273.940

Unit Organisasi	Pagu (Rp)	Realisasi		Sisa Anggaran (Rp)
		Nominal (Rp)	%	
D3.3	Rp3.708.029.000	Rp291.120.975	7,85%	Rp3.416.908.025
D4.1	Rp1.944.566.000	Rp57.229.881	2,94%	Rp1.887.336.119
D4.2	Rp3.060.763.000	Rp38.368.082	1,25%	Rp3.022.394.918
D4.3	Rp1.984.221.000	Rp85.861.460	4,33%	Rp1.898.359.540
INSPEKTORAT	Rp927.860.000	Rp30.591.399	3,30%	Rp897.268.601
PUSDATIN	Rp9.118.948.000	Rp1.152.661.937	12,64%	Rp7.966.286.063
PUSLAT	Rp3.768.782.000	Rp166.743.314	4,42%	Rp3.602.038.686
TOTAL	Rp166.711.994.000	Rp12.239.412.238	7,34%	Rp154.472.581.762

1.2 PELAPORAN EKSTERNAL

1.2.1. Pelaporan Kinerja pada E-Monev BAPPENAS

Berdasarkan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan bahwa seluruh Kementerian dan Lembaga perlu melaksanakan pemantauan. Pemantauan dilakukan terhadap pelaksanaan program dan kegiatan melalui E-monev Bappenas.

Pengumpulan data pada aplikasi ini adalah rutin setiap bulannya. Setiap K/L/PD diharapkan dapat melaporkan kinerjanya melalui e-monev bappenas setiap bulan. Petunjuk pengisian e-monev bappenas dapat dilihat melalui tautan sebagai berikut: https://emonev.bappenas.go.id/fe/panduan/2021/Pedoman-eMonev_2021_v1_19032021.pdf.

LKPP sampai dengan Bulan Februari 2025 belum dapat melaporkan capaian kinerja dikarenakan aplikasi emonev BAPPENAS masih dalam proses penyesuaian informasi kinerja tahun 2025.

BAB II MONITORING DAN EVALUASI UNIT ORGANISASI

Sampai dengan bulan Februari 2025, kinerja LKPP pada level Sasaran Strategis, Sasaran Program, Sasaran Kegiatan, dan Rincian Output berpedoman pada Keputusan Kepala LKPP Nomor 23 Tahun 2025 tentang Rancangan Rencana Kerja LKPP Tahun 2025. Namun, masih terdapat dinamika perubahan seiring dengan terbitnya Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang RPJMN 2025-2029 dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Anggaran. Atas dinamika tersebut, dokumen Rencana Strategis (Renstra) LKPP tahun 2025-2029 dan Rencana Kerja (Renja) LKPP tahun 2025 masih dalam proses penyempurnaan, seperti perubahan dan/atau penyesuaian nomenklatur, target maupun satuan kinerja.

2.1 BIRO PERENCANAAN DAN KEUANGAN (BPKEU)

A. Capaian Kinerja Fisik

Berdasarkan Kepka LKPP Nomor 23 Tahun 2025, Biro Perencanaan dan Keuangan (BPKeu) memiliki 4 Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan dan 4 Rincian Output dengan rincian sebagai berikut:

1. Sasaran Kegiatan

No	Sasaran Kegiatan	Indikator	Target 2025	Realisasi /Progres
1	01- Terpenuhinya kualitas penerapan akuntabilitas kinerja dan anggaran	Nilai kualitas perencanaan, pengukuran dan pelaporan kinerja	Predikat: Sangat Baik	Progres: 17%
		Indeks maturitas SPIP	Predikat: Level 3	Progres: 12%
		Indeks kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA)	Predikat: Baik	Progres: 16,67%
		Persentase kesalahan material dalam laporan keuangan yang ditoleransi pada pengelolaan keuangan	5 Persen	-

2. Rincian Output

No	MAK	Rincian Ouput	Target 2025	Realisasi /Progres
1	6599.EBA.994	Layanan Perkantoran	1 Layanan	Progres: 16,17%

2	6599.EBD.952	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	6 Dokumen	Progres: 10%
3	6599.EBD.953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	3 Dokumen	Progres: 13%
4	6599.EBD.955	Layanan Manajemen Keuangan	17 Dokumen	Progres: 16,67%

B. Capaian Kinerja Anggaran

Berdasarkan DIPA awal LKPP TA 2025, pagu anggaran Biro Perencanaan dan Keuangan adalah sebesar Rp68.715.427.000. Berdasarkan aplikasi MonSAKTI Kementerian Keuangan sampai dengan mFebruari 2025, penyerapan per jenis belanja pada Biro Perencanaan dan Keuangan sebagai berikut:

Jenis Belanja	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase	Sisa Anggaran
51 Belanja Pegawai	65.901.318.000	6.872.459.679	10.43%	59.028.858.321
52 Belanja Barang	2.814.109.000	94.258.216	3.35%	2.719.850.784
53 Belanja Modal	-	-	-	-
Total	68.715.427.000	6.966.717.895	10.14%	61.748.709.105

C. Catatan Monitoring dan Evaluasi

Berdasarkan revisi anggaran ke-2, terdapat anggaran blokir efisiensi pada BPKeu sebesar Rp 1.020.103.000 atau 1,5%

D. Rekomendasi

Adapun rekomendasi yang dapat di berikan adalah sebagai berikut:

1. Melakukan penyesuaian target kinerja dengan memperhatikan efisiensi anggaran pada setiap Unit Organisasi.
2. Menyampaikan usulan penyesuaian informasi kinerja tahun 2025 pasca efisiensi anggaran pada level Indikator Sasaran Kegiatan (IKSK) dan Rincian Output (RO).
3. Menyusun Rencana Penarikan Dana (RPD) untuk Triwulan II s.d Triwulan IV dengan menyesuaikan rencana kegiatan dan kemampuan dalam penyerapan anggaran agar deviasi antara RPD dengan realisasi anggaran masih dalam batas toleransi sebesar ($\pm 5\%$).

4. Guna tetap meningkatkan nilai IKPA di tingkat lembaga khususnya dalam penyerapan anggaran, BPKeu mengkoordinasikan seluruh unit organisasi agar terus memperhatikan delapan indikator IKPA, yaitu: Data Kontrak, Pengelolaan UP dan TUP, Dispensasi SPM, Penyerapan anggaran, Capaian Output, Penyelesaian Tagihan, Revisi Halaman 3 DIPA, Revisi DIPA.
5. Pimpinan unit organisasi agar melakukan pemantauan terhadap capaian dan/atau realisasi atas indikator Sasaran Kegiatan, Rincian Output, dan komponen agar seluruh target dapat tercapai tepat waktu.

2.2 BIRO HUKUM, ORGANISASI DAN SUMBER DAYA MANUSIA (BHOSDM)

A. Capaian Kinerja Fisik

Berdasarkan Kepka LKPP Nomor 23 Tahun 2025, Biro Hukum, Organisasi dan Sumber Daya Manusia (BHOSDM) memiliki 6 Indikator Kinerja Kegiatan dan 4 Rincian Output dengan rincian sebagai berikut:

1. Sasaran Kegiatan

No	Sasaran Kegiatan	Indikator	Target 2025	Realisasi/Progres
1	01-Meningkatnya capaian pelaksanaan kebijakan reformasi birokrasi	Indeks Kualitas Kebijakan	Predikat: Baik	Progres: 10%
		Indeks Reformasi Hukum	Predikat: Istimewa	Progres: 10%
		Skor komposit evaluasi kelembagaan	Skor: 77	Progres: 11.66%
		Persentase tingkat penerapan sistem kerja untuk penyederhanaan birokrasi	100 Persen	Progres: 15%
		Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti atas pelaksanaan kegiatan RB LKPP	100 Persen	Progres: 5%
		Indeks berAKHLAK	Predikat: Cukup Sehat	Progres: 5%
		Indeks sistem merit	Predikat: Baik	Progres: 5%

2. Rincian Output

No	MAK	Rincian Output	Target 2025	Realisasi/Progres
1	6598.EBA.957	Layanan Hukum	1 Layanan	Progres: 17.22%
2	6598.EBA.960	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	3 Layanan	Progres: 11.66%
3	6598.EBA.969	Layanan Bantuan Hukum	1 Layanan	Progres: 13.64%
4	6598.EBC.954	Layanan Manajemen SDM	3 Layanan	Progres: 11.26%

B. Capaian Kinerja Anggaran

Berdasarkan DIPA awal LKPP TA 2025, pagu anggaran BHOSDM adalah sebesar Rp5.742.195.000. Berdasarkan aplikasi MonSAKTI Kementerian Keuangan sampai dengan Februari 2025 (kumulatif), penyerapan per jenis belanja pada BHOSDM sebagai berikut:

Jenis Belanja	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase	Sisa Anggaran
51 Belanja Pegawai	-	-	-	-
52 Belanja Barang	5.682.195.000	198.274.726	3.49%	5.483.920.274
53 Belanja Modal	60.000.000	-	0%	60.000.000
Total	5.742.195.000	198.274.726	3.45%	5.543.920.274

C. Catatan Monitoring dan Evaluasi

Beberapa catatan pada BHOSDM di bulan Februari 2025 sebagai berikut:

1. Terdapat indikator sasaran kegiatan dan rincian output yang diusulkan penyesuaian target pasca efisiensi yaitu RO – Layanan Bantuan Hukum
2. Berdasarkan revisi anggaran ke-2, terdapat anggaran blokir efisiensi pada BHOSDM sebesar Rp Rp4.494.841.000 atau 78,28%
3. Terdapat 1 (satu) Indikator Sasaran Kegiatan (IKSK) yaitu Indeks BerAKHLAK dihapuskan karena Kementerian PANRB tidak melaksanakan penilaian Indeks BerAKHLAK untuk Tahun 2025.

D. Rekomendasi

Adapun rekomendasi yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Melakukan penyesuaian target kinerja dengan memperhatikan efisiensi anggaran pada setiap Unit Organisasi.
2. Menyampaikan usulan penyesuaian informasi kinerja tahun 2025 pasca efisiensi anggaran pada level Indikator Sasaran Kegiatan (IKSK) dan Rincian Output (RO).
3. Menyusun Rencana Penarikan Dana (RPD) untuk Triwulan II s.d Triwulan IV dengan menyesuaikan rencana kegiatan dan kemampuan dalam penyerapan anggaran agar deviasi antara RPD dengan realisasi anggaran masih dalam batas toleransi sebesar ($\pm 5\%$).
4. Pimpinan unit organisasi agar melakukan pemantauan terhadap capaian dan/atau realisasi atas indikator Sasaran Kegiatan, Rincian Output, dan komponen agar seluruh target dapat tercapai tepat waktu.

2.3 BIRO HUBUNGAN MASYARAKAT DAN UMUM (BHU)

A. Capaian Kinerja Fisik

Berdasarkan Kepka LKPP Nomor 23 Tahun 2025, Biro Hubungan Masyarakat dan Umum (BHU) memiliki 7 Indikator Kinerja Kegiatan dan 6 Rincian Output dengan rincian sebagai berikut:

1. Sasaran Kegiatan

No	Sasaran Kegiatan	Indikator	Target 2025	Realisasi/Progres
1	01-Terwujudnya pelayanan publik yang berkualitas	Indeks pelayanan publik	Predikat: Baik	Progres: 0%
		Indeks keterbukaan informasi publik	Predikat: Menuju Informatif	Progres: 0%
		Predikat Pelayanan Publik Berbasis HAM	Predikat: Tersedia	Progres: 0%
2.	02-Meningkatnya kualitas dan akuntabilitas pelayanan umum internal	Hasil pengawasan kearsipan	Predikat: Memuaskan	Progres: 15%
		Indeks tata kelola pengadaan	Predikat: Sangat Baik	Progres: 0%
		Indeks pengelolaan aset	Indeks 3,35	Progres: 0%
		Indeks layanan penyelenggaraan ketatausahaan	Predikat: Baik	Progres: 16%
		Indeks layanan keprotokolan	Predikat: Baik	Progres: 0%
		Indeks Kepuasan Pegawai Atas Layanan Kerumahtanggaan	Predikat: Memuaskan	Progres: 10%

2. Rincian Output

No	MAK	Rincian Ouput	Satuan	Target 2025	Realisasi
1	6600.EBA.956	Layanan BMN	Layanan	1	Progres: 17.00%
2	6600.EBA.958	Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi	Layanan	6	Progres: 12.21%

3	6600.EBA.959	Layanan Protokoler	Layanan	1	Progres: 28.47%
4	6600.EBA.962	Layanan Umum	Layanan	1	Progres: 26%
5	6600.EBC.994	Layanan Perkantoran	Layanan	1	Progres: 54.09%
6	6600.EBD.974	Layanan Penyelenggaraan Kearsipan	Dokumen	1	Progres: 26%

B. Capaian Kinerja Anggaran

Berdasarkan DIPA awal LKPP TA 2025, pagu anggaran BHU adalah sebesar Rp 44.938.473.000. Berdasarkan aplikasi MonSAKTI Kementerian Keuangan sampai dengan Februari 2025 (kumulatif), penyerapan per jenis belanja pada BHU sebagai berikut:

Jenis Belanja	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase	Sisa Anggaran
51 Belanja Pegawai	-	-	-	-
52 Belanja Barang	44.823.473.000	1.975.707.574	4.41%	42.847.765.426
53 Belanja Modal	115.000.000	-	0%	115.000.000
Total	44.938.473.000	1.975.707.574	1.09%	42.962.765.426

C. Catatan Monitoring dan Evaluasi

Beberapa catatan pada BHU di bulan Februari 2025 sebagai berikut:

1. Terdapat indikator sasaran kegiatan dan rincian output yang diusulkan penyesuaian target/nomenklatur pasca efisiensi yaitu:
 - a. IKSK - Indeks pelayanan publik
 - b. IKSK – Hasil pengawasan kearsipan
2. Berdasarkan revisi anggaran ke-2, terdapat anggaran blokir efisiensi pada BHU sebesar Rp Rp8.645.334.000 atau 19,24% dari pagu awal.
3. Terdapat indikator RO yang komponennya masih belum berprogres karena terkendala anggaran sebagai dampak efisiensi yaitu RO Layanan Penyelenggaraan Kearsipan.

D. Rekomendasi

Adapun rekomendasi yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Melakukan penyesuaian target kinerja dengan memperhatikan efisiensi anggaran pada setiap Unit Organisasi.
2. Menyampaikan usulan penyesuaian informasi kinerja tahun 2025 pasca efisiensi anggaran pada level Indikator Sasaran Kegiatan (IKSK) dan Rincian Output (RO).

3. Menyusun Rencana Penarikan Dana (RPD) untuk Triwulan II s.d Triwulan IV dengan menyesuaikan rencana kegiatan dan kemampuan dalam penyerapan anggaran agar deviasi antara RPD dengan realisasi anggaran masih dalam batas toleransi sebesar ($\pm 5\%$).
4. Menyusun dan menyampaikan Rencana Aksi PKT sebagai dasar pengukuran target kinerja periodik serta pelaporan realisasi rencana aksi triwulanan tahun 2025.
5. Pimpinan unit organisasi agar melakukan pemantauan terhadap capaian dan/atau realisasi atas indikator Sasaran Kegiatan, Rincian Output, dan komponen agar seluruh target dapat tercapai tepat waktu.

2.4 DIREKTORAT PENGEMBANGAN STRATEGI DAN KEBIJAKAN PENGADAAN UMUM (D1.1)

A. Capaian Kinerja Fisik

Berdasarkan Kepka LKPP Nomor 23 Tahun 2025, Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Umum (D1.1) memiliki 2 Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan dan 4 indikator Rincian Output dengan rincian sebagai berikut:

1. Sasaran Kegiatan

No	Sasaran Kegiatan	Indikator	Target 2025	Realisasi/Progres
1	03-Meningkatnya partisipasi dan kompetisi UMKK	[IKSK] 01-Jumlah penyedia UMKK yang on-boarding dalam sistem pengadaan digital	500 UMKK	-
2	01-Tersedianya kebijakan pengadaan barang/jasa	[IKSK] 01-Jumlah rumusan kebijakan pengadaan umum	3 Rancangan Peraturan	Progres: 48.25%

2. Rincian Output

No	MAK	Rincian Output	Target 2025	Realisasi/Progres
1	6319.AAC.111	Rancangan Peraturan Pemerintah tentang peraturan turunan Undang-Undang Pengadaan Barang/Jasa Publik	1 RPP	-
2.	6319.AAH.111	Rancangan Peraturan terkait Pedoman di bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	2 Rancangan Peraturan	Progres: 80%
3.	6319.ABL.111	Rekomendasi Strategi dan Kebijakan Pengadaan Umum	4 Rekomendasi Kebijakan	Progres: 16.50%
4.	6323.QDG.111	Penyedia UMK yang On-Boarding dalam Sistem Pengadaan Digital	500 UMKK	-

B. Capaian Kinerja Anggaran

Berdasarkan DIPA awal LKPP TA 2025, pagu anggaran D1.1 adalah sebesar Rp3.170.255.000,00. Berdasarkan aplikasi MonSAKTI Kementerian Keuangan sampai dengan Februari 2025 (kumulatif), penyerapan per jenis belanja pada D1.1 sebagai berikut:

Jenis Belanja	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase	Sisa Anggaran
51 Belanja Pegawai	-	-	-	-
52 Belanja Barang	3.170.255.000	148.318.633	4.68%	3.021.936.367
53 Belanja Modal	-	-	-	-
Total	3.170.255.000	148.318.633	4.68%	3.021.936.367

C. Catatan Monitoring dan Evaluasi

Beberapa catatan pada D1.1 di bulan Februari 2025 sebagai berikut:

1. Terdapat indikator sasaran kegiatan dan rincian output yang diusulkan penyesuaian target/nomenklatur pasca efisiensi yaitu:
 - a. IKSK – 01 - Jumlah penyedia UMKK yang on-boarding dalam sistem pengadaan digital
 - b. IKSK – 01 - Jumlah rumusan kebijakan pengadaan umum
 - c. RO - 6323.QDG.111 - Penyedia UMK yang On-Boarding dalam Sistem Pengadaan Digital
 - d. RO - 6319.AAC.111 - Rancangan Peraturan Pemerintah Tentang Peraturan Turunan Undang-Undang Pengadaan Barang/Jasa Publik
 - e. RO - 6319.AAH.111 - Rancangan Peraturan terkait Pedoman di bidang Pengadaan Barang dan Jasa Publik
 - f. RO - 6319.ABL.111 - Rekomendasi Strategi dan Kebijakan Pengadaan Umum
2. Berdasarkan revisi anggaran ke-2, terdapat anggaran blokir efisiensi pada D11 sebesar Rp 2.663.865.000 atau 84,03% dari pagu awal.
3. Terdapat 1 (satu) Rincian Output (RO) yang menjadi Prioritas Nasional yaitu RO 6323.QDG.111 Penyedia UMK yang On-Boarding dalam Sistem Pengadaan Digital.

D. Rekomendasi

Adapun rekomendasi yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Melakukan penyesuaian target kinerja dengan memperhatikan efisiensi anggaran pada setiap Unit Organisasi.
2. Menyampaikan usulan penyesuaian informasi kinerja tahun 2025 pasca efisiensi anggaran pada level Indikator Sasaran Kegiatan (IKSK) dan Rincian Output (RO).
3. Menyusun Rencana Penarikan Dana (RPD) untuk Triwulan II s.d Triwulan IV dengan menyesuaikan rencana kegiatan dan kemampuan dalam penyerapan anggaran agar deviasi antara RPD dengan realisasi anggaran masih dalam batas toleransi sebesar ($\pm 5\%$).

4. Pimpinan unit organisasi agar melakukan pemantauan terhadap capaian dan/atau realisasi atas indikator Sasaran Kegiatan, Rincian Output, dan komponen agar seluruh target dapat tercapai tepat waktu.

2.5 DIREKTORAT PENGEMBANGAN STRATEGI DAN KEBIJAKAN PENGADAAN KHUSUS (D1.2)

A. Capaian Kinerja Fisik

Berdasarkan Kepka LKPP Nomor 23 Tahun 2025, Direktorat Pengembangan Strategi Dan Kebijakan Pengadaan Khusus memiliki 5 Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan dan 3 Rincian Output dengan rincian sebagai berikut:

1. Sasaran Kegiatan

No	Sasaran Kegiatan	Indikator	Target 2025	Realisasi/Progres
1	01-Tersedianya kebijakan pengadaan barang/jasa	[IKSK] 02-Jumlah rumusan kebijakan pengadaan khusus	2 Dokumen	Progres: 15.00%
2	02-Tercapainya desa yang memiliki maturitas pengadaan	[IKSK] 01-Jumlah Desa yang Memiliki Nilai Maturitas Pengadaan Minimal Level 2	15 Desa	-
3	03-Terselenggaranya Pendampingan PBJ Khusus dan KPBU	[IKSK] 01-Persentase proyek dengan skema KPBU yang memperoleh pendampingan	100 Persen	-
		[IKSK] 02-Persentase instansi/lembaga yang mendapatkan pendampingan penyusunan peraturan PBJ Khusus	100 Persen	-
		[IKSK] 03-Persentase instansi/lembaga yang mendapatkan pendampingan proses PBJ Khusus	100 Persen	-

2. Rincian Output

No	MAK	Rincian Ouput	Target 2025	Realisasi/Progres
1	6319.AFA.124	Model Dokumen PBJ Khusus	2 NSPK	Progres: 15.00%
2	6319.BDB.123	Instansi/proyek yang mendapatkan pendampingan/diberikan pendapat dalam PBJ Khusus	5 Lembaga	Progres: 10.00%
3	6319.UBB.121	Desa yang Memiliki Nilai Maturitas Pengadaan Minimal Level 2	5 Desa	-

B. Capaian Kinerja Anggaran

Berdasarkan DIPA awal LKPP TA 2025, pagu anggaran D1.2 adalah sebesar Rp2.100.812.000. Berdasarkan aplikasi MonSAKTI Kementerian Keuangan sampai dengan Februari 2025 (kumulatif), penyerapan per jenis belanja pada D1.2 sebagai berikut:

Jenis Belanja	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase	Sisa Anggaran
51 Belanja Pegawai	-	-	-	-
52 Belanja Barang	2.100.812.000	63.251.923	3.01%	2.037.560.077
53 Belanja Modal	-	-	-	-
Total	2.100.812.000	63.251.923	3.01%	2.037.560.077

C. Catatan Monitoring dan Evaluasi

Beberapa catatan pada D1.2 di bulan Februari 2025 adalah sebagai berikut:

1. Terdapat indikator sasaran kegiatan dan rincian output yang diusulkan penyesuaian target/nomenklatur pasca efisiensi yaitu:
 - a. IKSK – 01 - Persentase proyek dengan skema KPBU yang memperoleh pendampingan
 - b. IKSK – 02 - Persentase instansi/lembaga yang mendapatkan pendampingan penyusunan peraturan PBJ Khusus
 - c. IKSK – 03 - Persentase instansi/lembaga yang mendapatkan pendampingan proses PBJ Khusus
2. Berdasarkan revisi anggaran ke-2, terdapat anggaran blokir efisiensi pada D12 sebesar Rp1.781.612.000 atau 84,81% dari pagu awal.
3. Terdapat 1 (satu) Rincian Output (RO) yang menjadi Prioritas Nasional yaitu RO 6319.UBB 121 - Desa yang Memiliki Nilai Maturitas Pengadaan Minimal Level 2.

D. Rekomendasi

Adapun rekomendasi yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Melakukan penyesuaian target kinerja dengan memperhatikan efisiensi anggaran pada setiap Unit Organisasi.
2. Menyampaikan usulan penyesuaian informasi kinerja tahun 2025 pasca efisiensi anggaran pada level Indikator Sasaran Kegiatan (IKSK) dan Rincian Output (RO).
3. Menyusun Rencana Penarikan Dana (RPD) untuk Triwulan II s.d Triwulan IV dengan menyesuaikan rencana kegiatan dan kemampuan dalam penyerapan anggaran agar deviasi antara RPD dengan realisasi anggaran masih dalam batas toleransi sebesar ($\pm 5\%$).
4. Pimpinan unit organisasi agar melakukan pemantauan terhadap capaian dan/atau realisasi atas indikator Sasaran Kegiatan, Rincian Output, dan komponen agar seluruh target dapat tercapai tepat waktu.

2.6 DIREKTORAT PENGEMBANGAN IKLIM USAHA DAN KERJASAMA INTERNASIONAL (D1.3)

A. Capaian Kinerja Fisik

Berdasarkan Kepka LKPP Nomor 23 Tahun 2025, Direktorat Pengembangan Iklim Usaha Dan Kerjasama Internasional memiliki 4 Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan dan 6 Rincian Output dengan rincian sebagai berikut:

1. Sasaran Kegiatan

No	Sasaran Kegiatan	Indikator	Target 2025	Realisasi/Progres
1.	01-Meningkatnya pemanfaatan produk berkelanjutan pada sistem pengadaan	[IKSK] 01-Persentase peningkatan rencana pengadaan berkelanjutan dalam SIRUP	10 Persen	Progres: 25.00%
2.	03-Meningkatnya partisipasi dan kompetisi UMKK	[IKSK]02-Persentase peningkatan pelaku UMKK yang terlibat dalam PBJ	17 Persen	Progres: 25.00%
	01-Tersedianya kebijakan pengadaan barang/jasa	[IKSK] 03-Jumlah rumusan kebijakan terkait pengadaan berkelanjutan	1 Dokumen	Progres: 17.00%
		[IKSK] 04-Jumlah rekomendasi kebijakan pengadaan barang/jasa dalam kerja sama Rekomendasi internasional	1	Progres: 13.00%

2. Rincian Output

No	MAK	Rincian Ouput	Target 2025	Realisasi/Progres
1	6319.PDA.131	Produk ramah lingkungan/berkelanjutan yang masuk dalam sistem pengadaan pemerintah	2 Produk	Progres: 33.00%
2	6319.QDB.131	K/L/Pemda yang menerapkan pengadaan barang dan jasa pemerintah untuk produk ramah lingkungan/ berkelanjutan	2 Lembaga	Progres: 17.00%
3	6319.PAH.131	Rancangan Peraturan terkait Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Untuk Produk Ramah Lingkungan/Berkelanjutan	1 Rancangan Peraturan	Progres: 17.00%
4	6319.PEC.131	Kerjasama di bidang PBJP dengan negara mitra/organisasi internasional/lembaga internasional	2 Kegiatan	Progres: 17.00%
5	6323.QDG.131	Pelaku Usaha UMK yang Mengikuti Kegiatan Peningkatan Kapasitas Usaha dalam PBJ	500 UMKM	128 UMKM
6	6323.QDC.131	Pemangku kepentingan yang mendapatkan akses informasi mengenai PBJP dalam kerangka kerjasama internasional	200 Orang	Progres: 8.00%

B. Capaian Kinerja Anggaran

Berdasarkan DIPA awal LKPP TA 2025, pagu D1.3 adalah sebesar Rp2.598.025.000. Berdasarkan aplikasi MonSAKTI Kementerian Keuangan sampai dengan Februari 2025 (kumulatif), penyerapan per jenis belanja pada D1.3 sebagai berikut:

Jenis Belanja	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase	Sisa Anggaran
51 Belanja Pegawai	-	-	-	-
52 Belanja Barang	2.598.025.000	90.344.153	3.48%	2.507.680.847
53 Belanja Modal	-	-	-	-
Total	2.598.025.000	90.344.153	3.48%	2.507.680.847

C. Catatan Monitoring dan Evaluasi

Beberapa catatan pada D1.3 di bulan Februari 2025 sebagai berikut:

1. Terdapat indikator sasaran kegiatan dan rincian output yang diusulkan penyesuaian target/nomenklatur pasca efisiensi yaitu:
 - a. IKSK – 01 - Persentase peningkatan rencana pengadaan berkelanjutan dalam SIRUP
2. Berdasarkan revisi anggaran ke-2, terdapat anggaran blokir efisiensi pada D13 sebesar Rp 2.135.973.000 atau 82,22% dari pagu awal.
3. Terdapat 6 (enam) Rincian Output (RO) yang menjadi Prioritas Nasional yaitu:
 - a. 6319.PDA.131 - Produk ramah lingkungan/berkelanjutan yang masuk dalam sistem pengadaan pemerintah
 - b. 6319.QDB.131 - K/L/Pemda yang menerapkan pengadaan barang dan jasa pemerintah untuk produk ramah lingkungan/ berkelanjutan
 - c. 6319.PAH.131 - Rancangan Peraturan terkait Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Untuk Produk Ramah Lingkungan/Berkelanjutan
 - d. 6319.PEC.131 - Kerjasama di bidang PBJP dengan negara mitra/organisasi internasional/lembaga internasional
 - e. 6323.QDG.131 - Pelaku Usaha UMK yang Mengikuti Kegiatan Peningkatan Kapasitas Usaha dalam PBJ
 - f. 6323.QDC.131 - Pemangku kepentingan yang mendapatkan akses informasi mengenai PBJP dalam kerangka kerjasama internasional.

D. Rekomendasi

Adapun rekomendasi yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Melakukan penyesuaian target kinerja dengan memperhatikan efisiensi anggaran pada setiap Unit Organisasi.

2. Menyampaikan usulan penyesuaian informasi kinerja tahun 2025 pasca efisiensi anggaran pada level Indikator Sasaran Kegiatan (IKSK) dan Rincian Output (RO).
3. Menyusun Rencana Penarikan Dana (RPD) untuk Triwulan II s.d Triwulan IV dengan menyesuaikan rencana kegiatan dan kemampuan dalam penyerapan anggaran agar deviasi antara RPD dengan realisasi anggaran masih dalam batas toleransi sebesar ($\pm 5\%$).
4. Pimpinan unit organisasi agar melakukan pemantauan terhadap capaian dan/atau realisasi atas indikator Sasaran Kegiatan, Rincian Output, dan komponen agar seluruh target dapat tercapai tepat waktu.

2.7 DIREKTORAT PERENCANAAN TRANSFORMASI, PEMANTAUAN, DAN EVALUASI PENGADAAN (D2.1)

A. Capaian Kinerja Fisik

Berdasarkan Kepka LKPP Nomor 23 Tahun 2025, Direktorat Perencanaan Transformasi, Pemantauan, dan Evaluasi Pengadaan memiliki 2 Sasaran Kegiatan dengan 8 Indikator Sasaran Kegiatan dan 2 Rincian Output dengan rincian sebagai berikut:

1. Sasaran Kegiatan

No	Sasaran Kegiatan	Indikator	Satuan	Target 2025	Realisasi/Progres
1	01- Terselenggaranya pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PBJ Nasional	01-Jumlah laporan evaluasi pelaksanaan PBJ Nasional	Laporan	3	-
		02-Jumlah laporan monitoring mingguan pelaksanaan PBJ Nasional	Laporan	58	7
		03-Jumlah laporan monitoring mingguan pelaksanaan PBJ pada K/L dan Pemda	Laporan	46	7
		04-Jumlah buku profil pengadaan barang/jasa pemerintah	Buku	1	Progres 15%
		05-Jumlah kajian pengembangan platform pengadaan nasional	Kajian	9	-
2	04-Meningkatnya kualitas perencanaan pengadaan pada K/L/Pemda	01-Jumlah K/L/Pemda yang mendapatkan bimbingan teknis perencanaan pengadaan berbasis data pengadaan	K/L/Pemda	124	Progres 10%
		02-Jumlah K/L/Pemda yang mencadangkan PDN minimal 95%	K/L/Pemda	324	Progres 25%
		03-Jumlah K/L/Pemda yang mencadangkan UMKK minimal 40%	K/L/Pemda	521	Progres 25%

2. Rincian Output

No	MAK	Rincian Ouput	Satuan	Target 2025	Realisasi /Progres
1	6320.BAH.211	Layanan Sistem Perencanaan PBJ	Layanan	1	Progres 16.67%

2	6320.FAE.211	Rekomendasi Hasil Monitoring dan Evaluasi Kinerja PBJP	Laporan	4	Progres 21.3%
---	--------------	--	---------	---	------------------

B. Capaian Kinerja Anggaran

Berdasarkan Kepka LKPP Nomor 23 Tahun 2025, pagu anggaran D2.1 adalah sebesar Rp1.963.356.000. Berdasarkan aplikasi MonSAKTI Kementerian Keuangan sampai dengan Februari 2025 (kumulatif), penyerapan per jenis belanja pada D2.1 sebagai berikut:

Jenis Belanja	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase	Sisa Anggaran
51 Belanja Pegawai	-	-	-	-
52 Belanja Barang	1.963.356.000	210.573.000	10.73%	1.752.783.000
53 Belanja Modal	-	-	-	-
Total	1.963.356.000	210.573.000	10.73%	1.752.783.000

C. Catatan Monitoring dan Evaluasi

Beberapa catatan pada D2.1 di bulan Februari 2025 adalah sebagai berikut:

1. Terdapat indikator sasaran kegiatan dan rincian output yang diusulkan penyesuaian target/nomenklatur pasca efisiensi yaitu:
 - a. Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK):
 - 01-Jumlah laporan evaluasi pelaksanaan PBJ Nasional
 - 02-Jumlah laporan monitoring mingguan pelaksanaan PBJ Nasional
 - 03-Jumlah laporan monitoring mingguan pelaksanaan PBJ pada K/L dan Pemda
 - 05-Jumlah kajian pengembangan platform pengadaan nasional
 - b. Rincian Output (RO):
 - 6320.BAH.211 - Layanan Sistem Perencanaan PBJ
 - 6320.FAE.211 - Rekomendasi Hasil Monitoring dan Evaluasi Kinerja PBJP
2. Berdasarkan revisi anggaran ke-2, terdapat anggaran blokir yang diakibatkan oleh kebijakan efisiensi anggaran belanja pada D2.1 sebesar Rp1,014,103,000 atau sebesar 51.65% dari pagu awal.

D. Rekomendasi

Adapun rekomendasi yang dapat diberikan kepada Direktorat Perencanaan Transformasi, Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan adalah sebagai berikut:

1. Melakukan penyesuaian pelaksanaan aktivitas/kegiatan yang mendukung ketercapaian target kinerja dengan memperhatikan efisiensi anggaran pada setiap Unit Organisasi.

2. Menyampaikan usulan penyesuaian informasi kinerja tahun 2025 pasca efisiensi anggaran pada level Indikator Sasaran Kegiatan (IKSK), Rincian Output (RO).
3. Menyusun Rencana Penarikan Dana (RPD) untuk Triwulan II s.d Triwulan IV dengan menyesuaikan rencana kegiatan dan kemampuan dalam penyerapan anggaran agar deviasi antara RPD dengan realisasi anggaran masih dalam batas toleransi sebesar ($\pm 5\%$).

2.8 DIREKTORAT SISTEM PENGADAAN DIGITAL (D2.2)

A. Capaian Kinerja Fisik

Berdasarkan Kepka LKPP Nomor 23 Tahun 2025, Direktorat Sistem Pengadaan Digital (D2.2) mengampu 1 Sasaran Kegiatan dengan 2 Indikator Sasaran Kegiatan dan 1 Rincian Output dengan rincian sebagai berikut:

1. Sasaran Kegiatan

No	Sasaran Kegiatan	Indikator	Satuan	Target 2025	Realisasi/Progres
1	02-Terselenggaranya platform pengadaan nasional dan pengembangan platform pengadaan nasional	01-Jumlah layanan pengembangan platform pengadaan nasional	Layanan	1	Progres 5%
		02-Jumlah layanan penyelenggaraan SPSE dan sistem pendukung	Layanan	1	Progres 7%

2. Rincian Output

No	MAK	Rincian Ouput	Satuan	Target 2025	Realisasi /Progres
1	6320.FAB.221	Layanan Penyelenggaraan Sistem Pengadaan Digital	Layanan	1	Progres 7%

B. Capaian Kinerja Anggaran

Berdasarkan DIPA awal LKPP TA 2025, pagu anggaran D2.2 adalah sebesar Rp7.521.299.000. Berdasarkan aplikasi MonSAKTI Kementerian Keuangan sampai dengan Februari 2025 (kumulatif). Penyerapan per jenis belanja pada D2.2 sebagai berikut:

Jenis Belanja	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase	Sisa Anggaran
51 Belanja Pegawai	-	-	-	-
52 Belanja Barang	7.521.299.000	498.879.996	6.63%	7.022.419.004
53 Belanja Modal	-	-	-	-
Total	7.521.299.000	498.879.996	6.63%	7.022.419.004

C. Catatan Monitoring dan Evaluasi

Catatan pada kinerja D2.2 di bulan Februari 2025 sebagai berikut:

1. Berdasarkan revisi anggaran ke-2, terdapat anggaran blokir yang diakibatkan oleh kebijakan efisiensi anggaran belanja pada D2.2 sebesar Rp5,188,431,000 atau sebesar 68.98% dari pagu awal.

D. Rekomendasi

Adapun rekomendasi yang dapat diberikan kepada Direktorat Sistem Pengadaan Digital adalah sebagai berikut:

1. Melakukan penyesuaian pelaksanaan aktivitas/kegiatan yang mendukung ketercapaian target kinerja dengan memperhatikan efisiensi anggaran pada setiap Unit Organisasi.
2. Menyampaikan usulan penyesuaian informasi kinerja tahun 2025 pasca efisiensi anggaran pada level Indikator Sasaran Kegiatan (IKSK), Rincian Output (RO).
3. Menyusun Rencana Penarikan Dana (RPD) untuk Triwulan II s.d Triwulan IV dengan menyesuaikan rencana kegiatan dan kemampuan dalam penyerapan anggaran agar deviasi antara RPD dengan realisasi anggaran masih dalam batas toleransi sebesar ($\pm 5\%$).

2.9 DIREKTORAT PASAR DIGITAL PENGADAAN (D2.3)

A. Capaian Kinerja Fisik

Berdasarkan Kepka LKPP Nomor 23 Tahun 2025, Direktorat Pasar Digital Pengadaan mengampu 2 Sasaran Kegiatan dengan 2 Indikator Sasaran Kegiatan dan 2 Rincian Output dengan rincian sebagai berikut:

1. Sasaran Kegiatan

No	Sasaran Kegiatan	Indikator	Satuan	Target 2025	Realisasi/Progres
1	02-Terselenggaranya platform pengadaan nasional dan pengembangan platform pengadaan nasional	03-Jumlah modul aplikasi integrasi pasar digital pengadaan	Modul	1	Progres 10%
2	03-Meningkatnya produk hasil kurasi pada pasar digital pengadaan	01-Jumlah produk hasil kurasi pada pasar digital pengadaan	Produk	200.000	83.649

2. Rincian Output

No	MAK	Rincian Output	Satuan	Target 2025	Realisasi/Progres
1	6320.FAB.231	Sistem Pasar Digital Pengadaan Terintegrasi	Modul Aplikasi	1	Progres 10%
2	6323.BIA.231	Produk Hasil Kurasi pada Pasar Digital Pengadaan	Produk	200.000	83.649

B. Capaian Kinerja Anggaran

Berdasarkan DIPA awal LKPP TA 2025, pagu anggaran D2.3 adalah sebesar Rp1,909,723,000. Berdasarkan aplikasi MonSAKTI Kementerian Keuangan sampai dengan Februari 2025 (kumulatif), penyerapan per jenis belanja pada D2.3 sebagai berikut:

Jenis Belanja	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase	Sisa Anggaran
51 Belanja Pegawai	-	-	-	-
52 Belanja Barang	1.909.723.000	182.781.230	9.57%	1.726.941.770
53 Belanja Modal	-	-	-	-

Jenis Belanja	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase	Sisa Anggaran
Total	1.909.723.000	182.781.230	9.57%	1.726.941.770

C. Catatan Monitoring dan Evaluasi

Beberapa catatan pada D2.3 di bulan Februari 2025 sebagai berikut:

1. Berdasarkan revisi anggaran ke-2, terdapat anggaran blokir yang diakibatkan oleh kebijakan efisiensi anggaran belanja pada D2.3 sebesar Rp775,388,000 atau sebesar 40.60% dari pagu awal.
2. Terdapat 1 (satu) Rincian Output (RO) yang menjadi Prioritas Nasional yaitu 6320.FAB.231 - Sistem Pasar Digital Pengadaan Terintegrasi

D. Rekomendasi

Adapun rekomendasi yang dapat diberikan kepada Direktorat Pasar Digital Pengadaan adalah sebagai berikut:

1. Melakukan penyesuaian pelaksanaan aktivitas/kegiatan yang mendukung ketercapaian target kinerja dengan memperhatikan efisiensi anggaran belanja pada setiap Unit Organisasi.
2. Menyampaikan usulan penyesuaian informasi kinerja tahun 2025 pasca efisiensi anggaran pada level Indikator Sasaran Kegiatan (IKSK), Rincian Output (RO) maupun RO Prioritas Nasional.
3. Menyusun Rencana Penarikan Dana (RPD) untuk Triwulan II s.d Triwulan IV dengan menyesuaikan rencana kegiatan dan kemampuan dalam penyerapan anggaran agar deviasi antara RPD dengan realisasi anggaran masih dalam batas toleransi sebesar ($\pm 5\%$).

2.10 DIREKTORAT PENGEMBANGAN PROFESI DAN KELEMBAGAAN (D3.1)

A. Capaian Kinerja Fisik

Tahun 2024, Direktorat Pengembangan Profesi dan Kelembagaan (D3.1) memiliki 2 Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan, 3 Rincian Output dengan rincian sebagai berikut:

1. Sasaran Kegiatan

No	Sasaran Kegiatan	Indikator	Target 2025	Realisasi/Progres
1.	01-Terwujudnya SDM PBJ yang kompeten	[IKSK] 01-Jumlah SDM JF PPBJ di K/L/Pemda	10.570 Orang	100.80 Orang
2.	03-Meningkatnya kapabilitas UKPBJ	[IKSK] 02-mJumlah K/L/Pemda yang memiliki UKPBJ mencapai maturitas minimal level 3	467 UKPBJ	447 UKPBJ

2. Rincian Output

No	MAK	Rincian Output	Satuan	Target 2025	Realisasi/Progres
1	6321.ABQ.311	Rekomendasi Kebijakan Pembinaan SDM dan Kelembagaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Rekomendasi Kebijakan	1	10 %
2.	6321.PDE.311	UKPBJ yang Mencapai Kematangan Minimal Level 3	Lembaga	35	8 Lembaga
3.	6321.PDH.311	SDM PBJ dan Non-JF PBJ	Orang	550	60 Orang

B. Capaian Kinerja Anggaran

Berdasarkan DIPA awal LKPP TA 2025, pagu anggaran D3.1 adalah sebesar Rp3.539.260.000. Berdasarkan aplikasi MonSAKTI Kementerian Keuangan sampai dengan Februari 2025 (kumulatif). Penyerapan per jenis belanja pada D3.1 sebagai berikut:

Jenis Belanja	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase	Sisa Anggaran
51 Belanja Pegawai	-	-	-	-
52 Belanja Barang	Rp3.539.260.000	Rp81.986.060	2.32%	Rp 3.457.273.940
53 Belanja Modal	-	-	-	-
Total	Rp3.539.260.000	Rp 81.986.060	2.32%	Rp3.457.273.940

C. Catatan Monitoring dan Evaluasi

Beberapa catatan pada D3.1 di bulan Februari 2025 sebagai berikut:

1. Terdapat indikator sasaran kegiatan dan rincian output yang diusulkan penyesuaian target/nomenklatur pasca efisiensi yaitu:
 - a. IKSK – 02 – Jumlah SDM JF PPBJ di K/L/Pemda;
 - b. IKSK – 03 – Jumlah SDM PBJ Perancang Kebijakan dan Sistem PBJ, Ekosistem PBJ, dan Kepala UKPBJ yang Kompeten; dan
 - c. RO- UKPBJ yang Mencapai Kematangan Minimal Level 3
2. Berdasarkan revisi anggaran ke-2, terdapat anggaran blokir efisiensi pada D31 sebesar Rp3.063.811.000 atau 86,57%.
3. Terdapat 2 (satu) Rincian Output yang menjadi Prioritas Nasional yaitu RO 6321.PDE.311 UKPBJ yang Mencapai Kematangan Minimal Level 3 dan RO 6321.PDH.311 SDM PBJ dan Non-JF PBJ.

D. Rekomendasi

Adapun rekomendasi yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Melakukan penyesuaian target kinerja dengan memperhatikan efisiensi anggaran pada setiap Unit Organisasi.
2. Menyampaikan usulan penyesuaian informasi kinerja tahun 2025 pasca efisiensi anggaran pada level Indikator Sasaran Kegiatan (IKSK) dan Rincian Output (RO).
3. Menyusun Rencana Penarikan Dana (RPD) untuk Triwulan II s.d Triwulan IV dengan menyesuaikan rencana kegiatan dan kemampuan dalam penyerapan anggaran agar deviasi antara RPD dengan realisasi anggaran masih dalam batas toleransi sebesar ($\pm 5\%$).
4. Menyusun Rencana Aksi PKT sebagai dasar pengukuran target kinerja periodik serta pelaporan realisasi rencana aksi triwulanan tahun 2025.
5. Pimpinan unit organisasi agar melakukan pemantauan terhadap capaian dan/atau realisasi atas indikator Sasaran Kegiatan, Rincian Output, dan komponen agar seluruh target dapat tercapai tepat waktu.

2.11 DIREKTORAT SERTIFIKASI PROFESI (D3.3)

A. Capaian Kinerja Fisik

Berdasarkan Kepka LKPP Nomor 23 Tahun 2025, Direktorat Sertifikasi Profesi (D3.3) memiliki 4 Indikator Kinerja Kegiatan dan 6 Rincian Output dengan rincian sebagai berikut:

1. Sasaran Kegiatan

No	Sasaran Kegiatan	Indikator	Target 2024	Realisasi/Progres
1	01-Terwujudnya SDM PBJ yang kompeten	Jumlah Peserta yang mengikuti Sertifikasi Kompetensi Pengelola Pengadaan Barang/Jasa	4.860 Orang	891 Orang
		Jumlah Peserta yang Mengikuti Sertifikasi Kompetensi Okupasi	600 Orang	160 Orang
		Jumlah Peserta yang Mengikuti Sertifikasi Perancang Kebijakan dan Sistem PBJ, Ekosistem PBJ, dan Kompetensi Kepala UKPBJ	20 Orang	-
		Indeks Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Sertifikasi Kompetensi PBJ	70 Indeks	-

2. Rincian Output

No	MAK	Rincian Output	Satuan	Target 2025	Realisasi/Progres
1	6321.ADD.331	Lembaga Pelaksana Uji Kompetensi PBJ yang Terstandar	Lembaga	5	1
2	6321.ADG.331	Asesor yang Mendapatkan Pembinaan	Orang	75	10%
3	6321.ADI.331	Peserta Sertifikasi SDM PBJ	Orang	5480	1.051
4	6321.AFA.331	Pedoman Sertifikasi PBJP	Pedoman	1	60%
5	6321.AFA.332	Materi Uji Sertifikasi PBJP	NSPK	20	1
6	6321.CCL.331	Sarana Sertifikasi PBJP	Unit	196	32

B. Capaian Kinerja Anggaran

Berdasarkan pagu awal Kepka LKPP Nomor 23 Tahun 2025, pagu anggaran D3.3 adalah sebesar Rp3.708.029.000 Berdasarkan aplikasi MonSAKTI Kementerian Keuangan sampai dengan Februari 2025 (kumulatif). Penyerapan per jenis belanja pada D3.3 sebagai berikut:

Jenis Belanja	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase	Sisa Anggaran
51 Belanja Pegawai	-	-	-	-
52 Belanja Barang	3.708.029.000	291.120.975	7.85%	3.416.908.025
53 Belanja Modal	-	-	-	-
Total	3.708.029.000	291.120.975	7.85%	3.416.908.025

C. Catatan Monitoring dan Evaluasi

Beberapa catatan pada D3.3 di bulan Februari 2025 sebagai berikut:

1. Terdapat indikator rincian output yang diusulkan penyesuaian target pasca efisiensi yaitu RO – 331-Asesor yang Mendapatkan Pembinaan
2. Berdasarkan revisi anggaran ke-2, terdapat anggaran blokir efisiensi pada D3.3 sebesar Rp2.321.421.000 atau 62,61%
3. Pada IKSK Jumlah Peserta yang Mengikuti Sertifikasi Perancang Kebijakan dan Sistem PBJ, Ekosistem PBJ, dan Kompetensi Kepala UKPBJ dan Indeks Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Sertifikasi Kompetensi PBJ masih dalam tahap perencanaan.
4. Pada Komponen Pembentukan dan Peningkatan Kapasitas Asesor yaitu kegiatan Pembentukan Asesor Kompetensi kemungkinan ditiadakan karena dampak efisiensi.

D. Rekomendasi

Adapun rekomendasi yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Melakukan penyesuaian target kinerja dengan memperhatikan efisiensi anggaran pada setiap Unit Organisasi.
2. Menyampaikan usulan penyesuaian informasi kinerja tahun 2025 pasca efisiensi anggaran pada level Indikator Sasaran Kegiatan (IKSK), Rincian Output (RO).
3. Menyusun Rencana Penarikan Dana (RPD) untuk Triwulan II s.d Triwulan IV dengan menyesuaikan rencana kegiatan dan kemampuan dalam penyerapan anggaran agar deviasi antara RPD dengan realisasi anggaran masih dalam batas toleransi sebesar ($\pm 5\%$).
4. Guna tetap meningkatkan nilai IKPA di tingkat lembaga khususnya dalam penyerapan anggaran, BPKeu mengkoordinasikan seluruh unit organisasi agar terus memperhatikan delapan indikator IKPA, yaitu: Data Kontrak, Pengelolaan UP dan TUP, Dispensasi SPM, Penyerapan anggaran, Capaian Output, Penyelesaian Tagihan, Revisi Halaman 3 DIPA, Revisi DIPA.

5. Pimpinan unit organisasi agar melakukan pemantauan terhadap capaian dan/atau realisasi atas indikator Sasaran Kegiatan, Rincian Output, dan komponen agar seluruh target dapat tercapai tepat waktu.

2.12 DIREKTORAT ADVOKASI PEMERINTAH PUSAT (D4.1)

A. Capaian Kinerja Fisik

Berdasarkan Kepka LKPP Nomor 23 Tahun 2025, Direktorat Advokasi Pemerintah Pusat (D4.1) memiliki 4 Indikator Kinerja Kegiatan dan 3 Rincian Output dengan rincian sebagai berikut:

1. Sasaran Kegiatan

No	Sasaran Kegiatan	Indikator	Target 2025	Realisasi/Progres
1	02-Terselenggaranya Konsolidasi, Probitiy Advice, dan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa	01-Jumlah kegiatan konsolidasi yang dilaksanakan oleh K/L	2 Kegiatan	Progres: 16,67%
		02-Jumlah kegiatan probity advice dan/atau advokasi yang dilakukan kepada K/L	14 Kegiatan	Progres: 16,67%
2	03-Terselenggaranya <i>clearing house</i> pengadaan yang efektif	01-Jumlah K/L yang mengimplementasikan/ menyelenggarakan <i>clearing house</i> pengadaan	56 K/L	Progres: 16,67%
3	02-Meningkatnya penggunaan produk dalam negeri (PDN) dan pemberdayaan UMKK	01-Jumlah K/L yang mendapatkan advokasi dalam rangka peningkatan penggunaan PDN dan pemberdayaan UMKK dalam proses PBJ	68 K/L	1 K/L

2. Rincian Output

No	MAK	Rincian Output	Satuan	Target 2025	Realisasi/Progres
1	6323.FAI.411	Kementerian/ Lembaga yang Mendapatkan Advokasi dalam rangka Peningkatan Penggunaan PDN dan Pemberdayaan UMKK dalam Proses PBJ	K/L	68	1
2	6322.FAI.412	Kementerian/ Lembaga yang Terbangun Kapabilitas untuk Melaksanakan <i>Clearing House</i>	K/L	20	Progres: 16,67%
3	6322.FAI.413	Kementerian/ Lembaga yang Mendapatkan <i>Probitiy Advice</i> , Konsolidasi dan/atau Advokasi	K/L	16	Progres: 16,67%

B. Capaian Kinerja Anggaran

Berdasarkan DIPA awal LKPP TA 2025, pagu anggaran D4.1 adalah sebesar Rp 1.944.566.000. Berdasarkan aplikasi MonSAKTI Kementerian Keuangan sampai dengan Februari 2025 (kumulatif). Penyerapan per jenis belanja pada D4.1 sebagai berikut:

Jenis Belanja	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase	Sisa Anggaran
51 Belanja Pegawai	-	-	-	-
52 Belanja Barang	1.944.566.000	57.229.881	2.94%	1.887.336.119
53 Belanja Modal	-	-	-	-
Total	1.944.566.000	57.229.881	2.94%	1.887.336.119

C. Catatan Monitoring dan Evaluasi

Beberapa catatan pada D4.1 di bulan Februari 2025 adalah sebagai berikut:

1. Terdapat indikator sasaran kegiatan dan rincian output yang diusulkan penyesuaian target/nomenklatur pasca efisiensi yaitu:
 - a. Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan:
 - 01 - Jumlah kegiatan konsolidasi yang dilaksanakan oleh K/L;
 - 02 - Jumlah kegiatan *probity advice* dan/atau advokasi yang dilakukan kepada K/L;
 - 01 - Jumlah K/L yang mengimplementasikan/ menyelenggarakan *clearing house* pengadaan;
 - 01 - Jumlah K/L yang mendapatkan advokasi dalam rangka peningkatan penggunaan PDN dan pemberdayaan UMKK dalam proses PBJ;
 - b. Rincian Output
 - 411 - Kementerian/ Lembaga yang Mendapatkan Advokasi dalam rangka Peningkatan Penggunaan PDN dan Pemberdayaan UMK dalam Proses PBJ;
 - 412 - Kementerian/ Lembaga yang Terbangun Kapabilitas untuk Melaksanakan *Clearing House*; dan
 - 413 - Kementerian/ Lembaga yang Mendapatkan *Probity Advice*, Konsolidasi dan/atau Advokasi.
2. Berdasarkan revisi anggaran ke-2, terdapat anggaran blokir efisiensi pada D4.1 sebesar Rp Rp Rp1.799.078.000 atau sebesar 92,52% dari pagu awal.
3. Terdapat 1 (satu) indikator kinerja sasaran kegiatan yang merupakan indikator dengan capaian berlanjut dari tahun 2024 yaitu 01-Jumlah K/L yang mengimplementasikan/ menyelenggarakan *clearing house* pengadaan dengan capaian 50 K/L pada tahun 2024.

D. Rekomendasi

Adapun rekomendasi yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Melakukan penyesuaian pelaksanaan aktivitas/kegiatan yang mendukung ketercapaian target kinerja dengan memperhatikan efisiensi anggaran belanja pada setiap Unit Organisasi.
2. Menyampaikan usulan penyesuaian informasi kinerja tahun 2025 pasca efisiensi anggaran pada level Indikator Sasaran Kegiatan (IKSK) dan Rincian Output (RO).
3. Menyusun Rencana Penarikan Dana (RPD) untuk Triwulan II s.d Triwulan IV dengan menyesuaikan rencana kegiatan dan kemampuan dalam penyerapan anggaran agar deviasi antara RPD dengan realisasi anggaran masih dalam batas toleransi sebesar ($\pm 5\%$).

2.13 DIREKTORAT ADVOKASI PEMERINTAH DAERAH (D4.2)

A. Capaian Kinerja Fisik

Tahun 2025, Direktorat Advokasi Pemerintah Daerah (D4.2) memiliki 4 Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan dan 3 Rincian Output dengan rincian sebagai berikut:

1. Sasaran Kegiatan

No	Sasaran Kegiatan	Indikator	Target 2025	Realisasi /Progres
1	02- Terselenggaranya Konsolidasi, Probitiy Advice, dan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa	03-Jumlah kegiatan konsolidasi yang dilaksanakan oleh Pemda	40 Kegiatan	5 Kegiatan
		04-Jumlah kegiatan <i>probitiy advice</i> yang dilakukan di Pemda	27 Kegiatan	Progres: 0%
		05-Jumlah Kegiatan Advokasi yang dilakukan di Pemda	150 Kegiatan	13 Kegiatan
2	03- Terselenggaranya <i>clearing house</i> pengadaan yang efektif	02-Jumlah Pemda yang mengimplementasikan/menyelenggarakan <i>clearing house</i>	120 Pemda	102 Pemda
3	02-Meningkatnya penggunaan produk dalam negeri (PDN) dan pemberdayaan UMKK	02-Jumlah pemerintah daerah yang mendapatkan advokasi dalam rangka peningkatan penggunaan PDN dan pemberdayaan UMKK dalam proses PBJ	100 Pemda	6 Pemda

2. Rincian Output

No	MAK	Rincian Output	Satuan	Target 2025	Realisasi/ Progres
1	6323.FAI.421	Pemerintah Daerah yang Mendapatkan Advokasi dalam rangka Peningkatan Penggunaan PDN dan Pemberdayaan UMK dalam Proses PBJ	Pemda	100	6
2	6322.FAI.422	Pemda yang Terbangun Kapabilitas untuk Melaksanakan <i>Clearing House</i>	Pemda	120	2
3	6322.FAI.423	Pemerintah Daerah yang Mendapatkan <i>Probitiy Advice</i> ,	K/L	150	12

B. Capaian Kinerja Anggaran

Berdasarkan DIPA awal LKPP TA 2025, pagu anggaran D4.2 adalah sebesar Rp 3.060.763.000. Berdasarkan aplikasi MonSAKTI Kementerian Keuangan sampai dengan Februari 2025 (kumulatif). Penyerapan per jenis belanja pada D4.2 sebagai berikut:

Jenis Belanja	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase	Sisa Anggaran
51 Belanja Pegawai	-	-	-	-
52 Belanja Barang	2.989.263.000	38.368.082	1,28%	2.950.894.918
53 Belanja Modal	71.500.000	-	-	71.500.000
Total	3.060.763.000	38.368.082	1,25%	2.950.894.918

C. Catatan Monitoring dan Evaluasi

Beberapa catatan pada D4.2 di bulan Februari 2025 adalah sebagai berikut:

1. Terdapat indikator sasaran kegiatan dan rincian output yang diusulkan penyesuaian target/nomenklatur pasca efisiensi yaitu:
 - a. Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan:
 - 03 - Jumlah kegiatan konsolidasi pengadaan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah
 - 04 - Jumlah kegiatan *probity advice* yang dilakukan di Pemerintah Daerah
 - 05 - Jumlah Kegiatan Advokasi yang dilakukan di Pemerintah Daerah
 - 02 - Jumlah Pemerintah Daerah yang mengimplementasikan/ menyelenggarakan *clearing house* pengadaan
 - 02 - Jumlah pemerintah daerah yang mendapatkan advokasi dalam rangka peningkatan penggunaan PDN dan pemberdayaan UMKK dalam proses PBJ
 - b. Rincian Output
 - 421 - Pemerintah Daerah yang Mendapatkan Advokasi dalam rangka Peningkatan Penggunaan PDN dan Pemberdayaan UMK dalam Proses PBJ
 - 422 - Pemerintah Daerah yang Terbangun Kapabilitas untuk Melaksanakan *Clearing House*
 - 423 - Pemerintah Daerah yang Mendapatkan Probity Advice, Konsolidasi dan/atau Advokasi
2. Berdasarkan revisi anggaran ke-2, terdapat anggaran blokir efisiensi pada D4.2 sebesar Rp Rp2.914.139.000 atau sebesar 95,21% dari pagu awal.
3. Terdapat 1 (satu) indikator kinerja sasaran kegiatan yang merupakan indikator dengan capaian berlanjut dari tahun 2024 yaitu 02-Jumlah Pemda yang

mengimplementasikan/menyelenggarakan *clearing house* dengan capaian 100 Pemda pada tahun 2024.

D. Rekomendasi

Adapun rekomendasi yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Melakukan penyesuaian pelaksanaan aktivitas/kegiatan yang mendukung ketercapaian target kinerja dengan memperhatikan efisiensi anggaran belanja pada setiap Unit Organisasi.
2. Menyampaikan usulan penyesuaian informasi kinerja tahun 2025 pasca efisiensi anggaran pada level Indikator Sasaran Kegiatan (IKSK) dan Rincian Output (RO).
3. Menyusun Rencana Penarikan Dana (RPD) untuk Triwulan II s.d Triwulan IV dengan menyesuaikan rencana kegiatan dan kemampuan dalam penyerapan anggaran agar deviasi antara RPD dengan realisasi anggaran masih dalam batas toleransi sebesar ($\pm 5\%$).

2.14 DIREKTORAT PENANGANAN PERMASALAHAN HUKUM (D4.3)

A. Capaian Kinerja Fisik

Berdasarkan Kepka LKPP Nomor 23 Tahun 2025, Direktorat Penanganan Permasalahan Hukum (D4.3) memiliki 5 Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan dan 5 Rincian Output dengan rincian sebagai berikut:

1. Sasaran Kegiatan

No	Sasaran Kegiatan	Indikator	Target 2025	Realisasi /Progres
1	01-Meningkatnya Kapabilitas Pencegahan Korupsi Pengadaan	01-Meningkatnya Kapabilitas Pencegahan Korupsi Pengadaan	2 K/L/Pemda	Progres: 5%
2	04-Meningkatnya dukungan penegakan hukum dan penyelesaian permasalahan PBJ	01-Persentase layanan PKA yang Optimal	30 Persen	23 Persen
		02-Persentase layanan LPS yang Optimal	30 Persen	Progres: 11%
		03-Persentase layanan penanganan pengaduan yang optimal	30 Persen	21 Persen
		04-Jumlah instansi/ <i>stakeholder</i> yang mendapatkan pembinaan dalam dukungan penegakan hukum dan penyelesaian permasalahan PBJ	4 Lembaga	Progres: 11%

2. Rincian Output

No	MAK	Rincian Output	Satuan	Target 2025	Realisasi/ Progres
1	6322.FAI.431	Instansi/Stakeholder yang Mendapatkan Pembinaan dalam Dukungan Penegakan Hukum dan Penyelesaian Permasalahan Kontrak	Lembaga	4	Progres: 11%
2	6322.BCE.431	Perkara/Permasalahan Kontrak PBJ yang Terlayani	Perkara	500	73
5	6322.UAI.431	K/L/Pemda Yang Terbangun Kapabilitas Untuk Pencegahan Korupsi Pengadaan	Lembaga	2	Progres: 5%
6	6322.BCE.432	Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa Kontrak PBJ yang berkualitas	Perkara	25	Progres: 11%

7	6322.BCE.433	Layanan Pemberian Keterangan Ahli Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang optimal	Perkara	400	79
---	--------------	---	---------	-----	----

B. Capaian Kinerja Anggaran

Berdasarkan DIPA awal LKPP TA 2025, pagu anggaran D4.3 adalah sebesar Rp 1.984.221.000. Berdasarkan aplikasi MonSAKTI Kementerian Keuangan sampai dengan Februari 2025 (kumulatif). Penyerapan per jenis belanja pada D4.3 sebagai berikut:

Jenis Belanja	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase	Sisa Anggaran
51 Belanja Pegawai	-	-	-	-
52 Belanja Barang	1.984.221.000	85.861.460	4.33%	1.898.359.540
53 Belanja Modal	-	-	-	-
Total	1.984.221.000	85.861.460	4.33%	1.898.359.540

C. Catatan Monitoring dan Evaluasi

Beberapa catatan pada D4.3 di bulan Februari 2025 adalah sebagai berikut:

1. Terdapat rincian output yang diusulkan penyesuaian target/nomenklatur pasca efisiensi yaitu:
 - a. RO - 432 - Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa Kontrak PBJ yang berkualitas;
 - b. RO - 433 - Layanan Pemberian Keterangan Ahli Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang optimal; dan
 - c. RO - 431 - Perkara/Permasalahan PBJ yang Terlayani.
2. Berdasarkan revisi anggaran ke-2, terdapat anggaran blokir efisiensi pada D43 sebesar Rp Rp1.667.207.000 atau 84,02% dari pagu awal.
3. Terdapat 1 (satu) Rincian Output (RO) yang menjadi Prioritas Nasional yaitu RO 6322.UAI.431 K/L/Pemda Yang Terbangun Kapabilitas Untuk Pencegahan Korupsi Pengadaan.
4. Terdapat 2 (dua) RO yang merupakan RO baru berdasarkan konsep rancangan Renstra LKPP dan masih dalam penyesuaian dokumen anggaran yaitu:
 - a. 6322.BCE.433 - Layanan Pemberian Keterangan Ahli Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang optimal; dan
 - b. 6322.BCE.432 - Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa Kontrak PBJ yang berkualitas.

D. Rekomendasi

Adapun rekomendasi yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Melakukan penyesuaian pelaksanaan aktivitas/kegiatan yang mendukung ketercapaian target kinerja dengan memperhatikan efisiensi anggaran belanja pada setiap Unit Organisasi.
2. Menyampaikan usulan penyesuaian informasi kinerja tahun 2025 pasca efisiensi anggaran pada level Indikator Sasaran Kegiatan (IKSK), Rincian Output (RO) maupun RO Prioritas Nasional.
3. Menyusun Rencana Penarikan Dana (RPD) untuk Triwulan II s.d Triwulan IV dengan menyesuaikan rencana kegiatan dan kemampuan dalam penyerapan anggaran agar deviasi antara RPD dengan realisasi anggaran masih dalam batas toleransi sebesar ($\pm 5\%$).

2.15 INSPEKTORAT

A. Capaian Kinerja Fisik

Berdasarkan Kepka LKPP Nomor 23 Tahun 2025, Inspektorat memiliki 4 Indikator Kinerja Kegiatan dan 2 Rincian Output dengan rincian sebagai berikut:

1. Sasaran Kegiatan

No	Sasaran Kegiatan	Indikator	Target 2025	Realisasi/Progres
1.	01-Terwujudnya kualitas tata kelola pengawasan intern organisasi	Persentase Pemenuhan Kapabilitas APIP pada Level 4	33.33 persen	Progres: 14%
		Indeks Pengelolaan Integritas	Predikat: Cukup	Progres: 15.71%
		Persentase Kualitas Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	72 Persen	Progres: 10%
		Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan dan Pengawasan	80 Persen	Progres: 10%

2. Rincian Output

No	MAK	Rincian Ouput	Satuan	Target 2025	Realisasi/Progres
1	5664.EBA.962	Layanan Umum	Dokumen	9	10%
2	5664.EBA.965	Layanan Audit Internal	Dokumen	12	10%

B. Capaian Kinerja Anggaran

Berdasarkan Kepka LKPP Nomor 23 Tahun 2025, pagu anggaran Inspektorat adalah sebesar Rp927.860.000. Berdasarkan aplikasi MonSAKTI Kementerian Keuangan sampai dengan Februari 2025 (kumulatif). Penyerapan per jenis belanja pada Inspektorat sebagai berikut:

Jenis Belanja	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase	Sisa Anggaran
51 Belanja Pegawai	-	-	-	-
52 Belanja Barang	927.860.000	30.591.399	3.3%	897.268.601
53 Belanja Modal	-	-	-	-
Total	927.860.000	30.591.399	3.3%	897.268.601

C. Catatan Monitoring dan Evaluasi

Terdapat beberapa catatan pada Inspektorat di bulan Februari 2025 sebagai berikut:

1. Terdapat indikator Komponen yang diusulkan penyesuaian target pasca efisiensi yaitu pada Komponen – 052-Implementasi Sistem Manajemen Anti Penyuaan

2. Berdasarkan revisi anggaran ke-2, terdapat anggaran blokir efisiensi pada Inspektorat sebesar Rp811.811.000 atau 87,49%
3. Pada Komponen Implementasi Sistem Manajemen Anti Penyuapan, Kegiatan ditiadakan karena dikeluarkannya kebijakan Inpres 1 Tahun 2025 Perihal Efisiensi Anggaran K/L/PD Output kegiatan tidak dapat direalisasikan karena untuk mencapai output yang ditargetkan dibutuhkan anggaran

D. Rekomendasi

Adapun rekomendasi yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Melakukan penyesuaian target kinerja dengan memperhatikan efisiensi anggaran pada setiap Unit Organisasi.
2. Menyampaikan usulan penyesuaian informasi kinerja tahun 2025 pasca efisiensi anggaran pada level Indikator Sasaran Kegiatan (IKSK), Rincian Output (RO).
3. Menyusun Rencana Penarikan Dana (RPD) untuk Triwulan II s.d Triwulan IV dengan menyesuaikan rencana kegiatan dan kemampuan dalam penyerapan anggaran agar deviasi antara RPD dengan realisasi anggaran masih dalam batas toleransi sebesar ($\pm 5\%$).
4. Guna tetap meningkatkan nilai IKPA di tingkat lembaga khususnya dalam penyerapan anggaran, BPKeu mengkoordinasikan seluruh unit organisasi agar terus memperhatikan delapan indikator IKPA, yaitu: Data Kontrak, Pengelolaan UP dan TUP, Dispensasi SPM, Penyerapan anggaran, Capaian Output, Penyelesaian Tagihan, Revisi Halaman 3 DIPA, Revisi DIPA.
5. Pimpinan unit organisasi agar melakukan pemantauan terhadap capaian dan/atau realisasi atas indikator Sasaran Kegiatan, Rincian Output, dan komponen agar seluruh target dapat tercapai tepat waktu.

2.16 PUSAT PELATIHAN SDM PENGADAAN BARANG/JASA

A. Capaian Kinerja Fisik

Berdasarkan Kepka LKPP Nomor 23 Tahun 2025, Pusat Pelatihan SDM Pengadaan Barang/Jasa memiliki 6 Indikator Kinerja Kegiatan dan 7 Rincian Output dengan rincian sebagai berikut:

1. Sasaran Kegiatan

No	Sasaran Kegiatan	Indikator	Target 2025	Realisasi /Progres
1	01-Terwujudnya SDM PBJ yang kompeten	04- Jumlah Peserta Pelatihan Fungsional dan Teknis Fungsional PBJ	1.300 Orang	1 Orang
		05- Jumlah Peserta Pelatihan Okupasi PBJ	12.000 Orang	1.161 Orang
		03- Jumlah Peserta Pelatihan Perancang Kebijakan dan Sistem PBJ, Ekosistem PBJ, dan Kepala UKPBJ	1.110 Orang	70 Orang
		04- Jumlah Peserta Pelatihan Tematik PBJ	12.110 Orang	1.250 Orang
		08- Jumlah Peserta Pelatihan Anti Korupsi PBJ	200 Orang	38 Orang
		09- Jumlah Peserta Pelatihan Teknis, Manajerial, dan Sosiokultural SDM PBJ	400 Orang	45 Orang

E. Rincian Output

No	MAK	Rincian Ouput	Satuan	Target 2025	Realisasi/ Progres
1	6321.CAA.511	Media Pembelajaran Berbasis TIK	Paket	5	6%
2	6321.DCF.511	Peserta Pelatihan PBJ	Orang	16.000	2401 Orang
3	6321.DCF.512	SDM yang Mendapatkan Pelatihan Perancang Kebijakan PBJ	Orang	400	45 Orang
4	6321.FAE.511	Laporan Penjaminan Mutu Penyelenggaraan Pelatihan PBJ	Laporan	5	16.67 %
5	6321.SCF.511	Peserta Pelatihan Anti Korupsi	Orang	200	38 Orang
6	6321.AFA.511	Program dan Kurikulum Pelatihan PBJ	NSPK	5	5%
7	6321.AFA.511	Pedoman Pelatihan PBJ	Pedoman	4	10%

B. Capaian Kinerja Anggaran

Berdasarkan Kepka LKPP Nomor 23 Tahun 2025, pagu anggaran Puslat SDM PBJ adalah sebesar Rp3.768.782.000 Berdasarkan aplikasi MonSAKTI Kementerian Keuangan sampai dengan Februari 2025 (kumulatif), penyerapan per jenis belanja pada Puslat PBJ sebagai berikut:

Jenis Belanja	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase	Sisa Anggaran
51 Belanja Pegawai	-	-	-	-
52 Belanja Barang	3.295.782.000	166.743.314	5.06%	3.129.038.686
53 Belanja Modal	473.000.000	-	-	473.000.000
Total	3.768.782.000	166.743.314	4.42%	3.602.038.686

C. Catatan Monitoring dan Evaluasi

Beberapa catatan pada Pusdiklat di bulan Februari 2025 adalah sebagai berikut:

1. Terdapat indikator sasaran kegiatan dan rincian output yang diusulkan penyesuaian target/nomenklatur pasca efisiensi yaitu:
 - a. IKSK-04-Jumlah Peserta Pelatihan Fungsional dan Teknis Fungsional PBJ
 - b. IKSK-05-Jumlah Peserta Pelatihan Okupasi PBJ
 - c. IKSK-07-Jumlah Peserta Pelatihan Tematik PBJ
 - d. RO- Program dan Kurikulum Pelatihan PBJ
 - e. RO-Media Pembelajaran Berbasis TIK
 - f. RO-Peserta Pelatihan PBJ
2. Berdasarkan revisi anggaran ke-2, terdapat anggaran blokir efisiensi pada Puslat sebesar Rp3.088.033.000 atau 81,93%.

D. Rekomendasi

Adapun rekomendasi yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Melakukan penyesuaian target kinerja dengan memperhatikan efisiensi anggaran pada setiap Unit Organisasi.
2. Menyampaikan usulan penyesuaian informasi kinerja tahun 2025 pasca efisiensi anggaran pada level Indikator Sasaran Kegiatan (IKSK) dan Rincian Output (RO).
3. Menyusun Rencana Penarikan Dana (RPD) untuk Triwulan II s.d Triwulan IV dengan menyesuaikan rencana kegiatan dan kemampuan dalam penyerapan anggaran agar deviasi antara RPD dengan realisasi anggaran masih dalam batas toleransi sebesar ($\pm 5\%$).

4. Pimpinan unit organisasi agar melakukan pemantauan terhadap capaian dan/atau realisasi atas indikator Sasaran Kegiatan, Rincian Output, dan komponen agar seluruh target dapat tercapai tepat waktu.

2.17 PUSAT DATA DAN INFORMASI (PUSDATIN)

A. Capaian Kinerja Fisik

Berdasarkan Kepka LKPP Nomor 23 Tahun 2025, Pusat Data Dan Informasi (PUSDATIN) memiliki 1 Indikator Kinerja Kegiatan dan 4 Rincian Output dengan rincian sebagai berikut:

1. Sasaran Kegiatan

No	Sasaran Kegiatan	Indikator	Target 2025	Realisasi/Progres
1.	01-Terwujudnya Layanan Data yang Informatif	Nilai Indeks Pembangunan Statistik	Indeks 2,9	Progres: 16,7%
		Persentase Pemenuhan Data Prioritas	100 Persen	Progres: 16,7%
2.	02- Terselenggaranya Platform Manajemen Perkantoran Terintegrasi dan Sistem Pendukung PBJ	Persentase Pembangunan dan Pengintegrasian Sistem Informasi manajemen perkantoran	30 Persen	Progres: 16,7%
		Persentase Pembangunan dan Pengintegrasian Sistem Informasi Sistem Pendukung Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	30 Persen	Progres: 16,7%
		Persentase Terpeliharanya Sistem Informasi manajemen perkantoran	100 Persen	Progres: 16,7%
		Persentase Terpeliharanya Sistem Informasi Sistem Pendukung Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	100 Persen	Progres: 16,7%
3.	03-Terwujudnya Layanan Pengelolaan Infrastruktur dan Keamanan Informasi TIK yang andal dan responsif	Persentase Ketersediaan Layanan Jaringan Perkantoran	100 Persen	Progres: 16,7%
		Persentase Ketersediaan Layanan Komputasi	100 Persen	Progres: 16,7%
		Predikat Cyber Security Maturity (CSM)	Indeks 4,2	Progres: 16,7%
		Persentase Insiden Keamanan Informasi yang ditangani	85 Persen	Progres: 16,7%
4.	Terwujudnya tata kelola Pusdatin dan SPBE yang akuntabel	Predikat SAKIP Pusdatin	Nilai: 65	Progres: 16,7%
		Nilai Indeks SPBE	Nilai: 3,7	Progres: 16,7%
		Hasil Survei Kepuasan Layanan Pusdatin	Nilai: 3,2	Progres: 16,7%

1. Rincian Output

No	MAK	Rincian Ouput	Satuan	Target 2025	Realisasi
1	7033.EBA.96 3	Layanan Data dan Informasi	Layanan	1	16.70%
2	7033.BMA.96 3	Layanan Data Warehouse Walidata LKPP	Layanan	1	16.70%
3	7033.CCL.96 3	Layanan Operasional Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi	Unit	16	16.70%
4	7033.FAB.96 3	Sistem Pendukung Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Sistem Informasi	5	16.70%

B. Capaian Kinerja Anggaran

Berdasarkan DIPA awal LKPP TA 2025, pagu anggaran Pusdatin TA 2025 adalah sebesar Rp9.118.948.000 Berdasarkan aplikasi MonSAKTI Kementerian Keuangan sampai dengan Februari 2025 (kumulatif). Penyerapan per jenis belanja pada Pusdatin sebagai berikut:

Jenis Belanja	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase	Sisa Anggaran
51 Belanja Pegawai	-	-	-	-
52 Belanja Barang	7.742.163.000	1.152.661.937	14.89%	6.589.501.063
53 Belanja Modal	1.376.785.000	-	-	1.376.785.000
Total	9.118.948.000	1.152.661.937	12.64%	7.966.286.063

C. Catatan Monitoring dan Evaluasi

Beberapa catatan pada Pusdatin di bulan Februari 2025 adalah sebagai berikut:

1. Terdapat indikator sasaran kegiatan dan rincian output yang diusulkan penyesuaian target/nomenklatur berdasarkan konsep Renstra baru yaitu:
 - a. IKSK - Nilai Indeks Pembangunan Statistik
 - b. IKSK - Persentase Pemenuhan Data Prioritas
 - c. IKSK - Persentase Pembangunan dan Pengintegrasian Sistem Informasi manajemen perkantoran
 - d. IKSK - Persentase Pembangunan dan Pengintegrasian Sistem Informasi Sistem Pendukung Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
 - e. IKSK - Persentase Terpeliharanya Sistem Informasi manajemen perkantoran
 - f. IKSK - Persentase Terpeliharanya Sistem Informasi Sistem Pendukung Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

- g. IKSK - Persentase Ketersediaan Layanan Jaringan Perkantoran
 - h. IKSK - Persentase Ketersediaan Layanan Komputasi
 - i. IKSK - Indeks Cyber Security Maturity (CSM)
 - j. IKSK - Persentase Insiden Keamanan Informasi yang ditangani
 - k. IKSK - Nilai SAKIP Pusdatin
 - l. IKSK - Indeks SPBE
 - m. IKSK - Hasil Survei Kepuasan Layanan Pusdatin
 - n. RO - Layanan Operasional Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi
 - o. RO - Sistem Pendukung Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
2. Berdasarkan revisi anggaran ke-2, terdapat anggaran blokir efisiensi pada BHU sebesar Rp6.192.894.000 atau 67,91% dari pagu awal.
 3. Terdapat indikator Sasaran Kegiatan yang progresnya terkendala karena anggaran sebagai dampak efisiensi yaitu:
 - a. IKSK - Persentase Ketersediaan Layanan Jaringan Perkantoran
 - b. IKSK - Nilai Indeks SPBE

D. Rekomendasi

Adapun rekomendasi yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Melakukan penyesuaian target kinerja dengan memperhatikan efisiensi anggaran pada setiap Unit Organisasi.
2. Menyusun dan menyampaikan Rencana Aksi PKT sebagai dasar pengukuran target kinerja periodik serta pelaporan realisasi rencana aksi triwulanan tahun 2025.
3. Menyusun Rencana Penarikan Dana (RPD) untuk Triwulan II s.d Triwulan IV dengan menyesuaikan rencana kegiatan dan kemampuan dalam penyerapan anggaran agar deviasi antara RPD dengan realisasi anggaran masih dalam batas toleransi sebesar ($\pm 5\%$).
4. Menyusun dan menyampaikan Rencana Aksi PKT sebagai dasar pengukuran target kinerja periodik serta pelaporan realisasi rencana aksi triwulanan tahun 2025.
5. Pimpinan unit organisasi agar melakukan pemantauan terhadap capaian dan/atau realisasi atas indikator Sasaran Kegiatan, Rincian Output, dan komponen agar seluruh target dapat tercapai tepat waktu.

BAB III KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan laporan hasil monitoring dan evaluasi periode bulan Februari 2025, dapat diambil beberapa kesimpulan, yaitu:

1. Seiring dengan terbitnya Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang RPJMN 2025-2029 dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Anggaran, saat ini Rancangan Renstra LKPP Tahun 2025-2029 dan Rancangan Renja LKPP Tahun 2025 sedang dalam tahap penyesuaian sehingga pelaporan kinerja LKPP sampai dengan Februari 2025 pada level Sasaran Strategis, Sasaran Program, Sasaran Kegiatan, dan Rincian Output berpedoman pada Keputusan Kepala LKPP Nomor 23 Tahun 2025 tentang Rancangan Rencana Kerja LKPP Tahun 2025.
2. Pada tahun 2025, LKPP mendapatkan pagu anggaran sebesar Rp166.711.994.000 dan sampai dengan bulan Februari 2025 penyerapan LKPP (kumulatif) adalah sebesar Rp12.239.412.238 (7,34%) yang terdiri dari:

Jenis Belanja	Pagu (Rp)	Realisasi		Sisa Anggaran (Rp)
		Nominal (Rp)	%	
51 Belanja Pegawai	65.901.318.000	6.872.459.679	10,43%	59.028.858.321
52 Belanja Barang	98.714.391.000	5.366.952.559	5,44%	93.347.438.441
53 Belanja Modal	2.096.285.000	-	0%	2.096.285.000
TOTAL	166.711.994.000	12.239.412.238	7,34%	154.472.581.762

3. Sesuai dengan amanat Inpres Nomor 1 Tahun 2025 Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 beserta rincian nilai efisiensi anggaran yang disampaikan oleh Kementerian Keuangan, nilai efisiensi anggaran LKPP adalah Rp49,578 M atau 29,75% dari pagu awal LKPP pada tahun 2025.
4. Mengingat sampai dengan saat ini masih belum adanya kebijakan terkait dengan pengembalian atas pagu anggaran yang diefisiensi, maka penyampaian pelaporan kinerja dan anggaran pada bulan Februari 2025 masih menggunakan pagu awal sebesar Rp166.711.944.000 dan belum dapat menyajikan realisasi anggaran pada level unit organisasi.
5. Nilai IKPA LKPP bulan Februari 2024 berdasarkan Aplikasi OMSPAN (spanint.kemenkeu.go.id) adalah sebesar 64,43.

6. Nilai Kinerja Anggaran (NKA) LKPP pada aplikasi SMART Kementerian Keuangan sampai dengan saat ini belum dapat diinformasikan, dikarenakan aplikasi SMART DJA Kementerian Keuangan masih dalam proses penyesuaian informasi kinerja tahun 2024.
7. Sampai dengan Februari 2025, LKPP belum dapat melaporkan capaian kinerja pada aplikasi E-Monev Bappenas dan SMART Kemenkeu karena aplikasi tersebut masih dalam proses penyesuaian informasi kinerja tahun 2025.

B. Rekomendasi

Berdasarkan hasil Laporan Monitoring dan Evaluasi Periode Februari 2025, beberapa rekomendasi yang dapat diberikan yaitu:

1. Melakukan penyesuaian pelaksanaan aktivitas/kegiatan yang mendukung ketercapaian target kinerja dengan memperhatikan efisiensi anggaran belanja pada setiap Unit Organisasi.
2. Menyampaikan usulan penyesuaian informasi kinerja tahun 2025 pasca efisiensi anggaran pada level Indikator Sasaran Kegiatan (IKSK), Rincian Output (RO) maupun RO Prioritas Nasional kepada Biro Perencanaan dan Keuangan
3. Menyusun Rencana Penarikan Dana (RPD) untuk Triwulan II s.d Triwulan IV dengan menyesuaikan rencana kegiatan dan kemampuan dalam penyerapan anggaran agar deviasi antara RPD dengan realisasi anggaran masih dalam batas toleransi sebesar ($\pm 5\%$).
4. Dalam rangka menindaklanjuti hasil evaluasi SAKIP Tahun 2024 dari Kementerian PANRB, setiap unit organisasi agar mengoptimalkan aplikasi SiREMON dan menumbuhkan rasa kepemilikan kinerja pada setiap pimpinan baik level lembaga maupun seluruh unit/ satuan kerja dengan mendorong pemanfaatan fitur “arahan dan diskusi”. Pimpinan dapat memberikan *feedback*/rekomendasi langkah strategis yang perlu dilakukan atas permasalahan yang muncul dalam upaya pelaksanaan kinerja oleh unit organisasi sebagai bentuk pelaksanaan dialog kinerja, sehingga unit organisasi mendapat arahan yang jelas dan dapat merumuskan upaya tindak lanjut yang perlu dilakukan sesuai arahan pimpinan untuk mengatasi permasalahan dan memotong pencapaian kinerja.
5. PIC Pelaporan setiap unit organisasi agar melaporkan capaian kinerja dan anggaran serta bukti dukung pada aplikasi SiREMON secara berkala.

